

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

“Namanja bukan Pantja Dharma, tetapi saja namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa — namanja ialah Pantja Sila. Sila artinja azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi. (Tepuk tangan riuh).”

Pernyataan tersebut Bung Karno lontarkan dalam pidatonya di hadapan Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato itulah yang menjadi momentum awal penyebutan “Pancasila” sebagai dasar negara Indonesia. Sehingga tanggal 1 Juni pun menjadi kesepakatan sebagai Hari Lahir Pancasila yang bangsa Indonesia peringati setiap tahun serta jadikan sebagai hari libur nasional.

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah, “Siapakah ahli bahasa yang Bung Karno sebut sebagai pemberi petunjuk dalam pemilihan nama Pancasila?”

Begitu penting peran sang ahli bahasa itu sehingga petunjuknya menjadi inspirasi bagi Bung Karno dalam menetapkan nama dasar Indonesia yang hingga kini bertahan selama 75 tahun. Di antara 67 orang anggota BPUPKI, nama Muhammad Yamin mencuat. Asvi Warman Adam (2009) menyebut bahwa dari berbagai talenta Yamin yang begitu banyak, ahli bahasa adalah salah satunya. Memori kolektif bangsa mengenai persatuan Indonesia yang diperkuat oleh Sumpah Pemuda pada 20 Oktober

1928 pun memuat catatan bahwa Yamin adalah tokoh pemuda yang mengusulkan Bahasa Indonesia sebagai tali untai pemersatu suatu bangsa yang merentang sepanjang 5042 km pada garis khatulistiwa yang terdiri lebih dari 1300 suku bangsa serta 700-an bahasa daerah.

Muhammad Yamin pula yang menjadi pengusul nama “Piagam Jakarta” yang kemudian menjadi salah satu pangkal polemik di antara para *founding fathers* mengenai dasar negara Indonesia yang apakah berazaskan agama Islam ataukah nasionalisme sekuler. Polemik perihal peran Muhammad Yamin dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ternyata berujung panjang. Beberapa tokoh bangsa dalam Panitia Lima yang bertugas merumuskan pengertian Pancasila pada tahun 1975 meragukan isi buku “Naskah Persiapan UUD 1945” yang Yamin susun pada tahun 1959. Keraguan itu berdasarkan pengalaman mereka bahwa sesungguhnya Yamin tak berpidato panjang sebagaimana teks yang Yamin muat dalam buku karangannya itu. Polemik kemudian berlanjut ketika Nugroho Notosusanto yang adalah sejarawan Universitas Indonesia serta pendiri Pusat Sejarah ABRI menyusun buku Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik pada tahun 1978. Dalam buku itu Nugroho bahkan mengecilkan peran Bung Karno sebagai orang pertama yang mengajukan nama Pancasila.

Akhirnya, titik terang muncul pada tahun 2004 ketika AB Kusuma menerbitkan berjudul “Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945”. Dalam buku itu Kusuma menyimpulkan bahwa Muhammad Yamin memang tak memberikan pidato seperti yang ditulis dalam buku karangan Yamin tahun 1959. Kusuma memuat pidato

Yamin yang sejatinya hanya menelan waktu 20 menit. Sedangkan pidato Yamin yang dimuat dalam buku karangan tahun 1959 berjumlah sekitar 20 halaman yang dapat memakan waktu sekitar satu jam.

Berdasarkan jejak-jejak polemik tersebut, masih relevankah bila mengajukan pendapat bahwa Muhammad Yamin memiliki kontribusi penting dalam proses perumusan Pancasila? Penulis berpendapat bahwa meski berbagai polemik telah mengungkap noktah merah Yamin dalam penulisan sejarah perumusan dasar negara, hal itu tak dapat menghapus kontribusi Yamin dalam proses perumusan Pancasila. Kesaksian KH. Masjkur dalam buku karya Feillarrd (2009) menjadi salah satu bukti penguat bahwa pada 31 Mei 1945, sehari sebelum Bung Karno berpidato pada 1 Juni 1945, anggota-anggota BPUPKI, termasuk Bung Karno, berkumpul di rumah Yamin. Pada pertemuan itulah nama Pancasila dicetuskan. Kesaksian itu menjadi bukti yang memverifikasi pernyataan Bung Karno perihal seorang ahli bahasa yang telah memberi petunjuk dalam merumuskan nama Pancasila sebagai dasar negara.

Paparan tonggak perumusan Pancasila beserta rangkaian polemik yang menyertainya tersebut di atas menjadi latar belakang masalah yang memicu penulis untuk mengkaji perihal bagaimana peran Muhammad Yamin dalam perumusan Pancasila. Terlepas dari polemik panjang perihal kesahihan peran Yamin dalam perumusan Pancasila, penulis memilih untuk melacak sejarah serta konstruksi pemikiran Yamin yang kemudian menjadi pokok-pokok pikiran Pancasila. Berdasarkan pendekatan ini penulis hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya peran Yamin dalam proses perumusan Pancasila tak dapat hanya berdasarkan pada

sepotong masa yang sangat singkat dalam BPUPKI. Momentum kerja-kerja BPUPKI bagi penulis adalah pucuk gunung es dari batang tubuh pemikiran Yamin yang berlangsung dalam bilangan masa yang panjang. Oleh karena itu penting untuk melacak bagaimana pembentukan pemikiran Yamin mengenai dasar negara Indonesia dalam rentang kehidupannya sebagai pemikir sekaligus aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian, fokus kajian tesis ini ialah perihal sejarah pemikiran Muhammad Yamin yang kemudian menjadi pokok-pokok pikiran dalam Pancasila, bukan mengenai Pancasila secara *an sich*. Fokus kajian ini menjadikan Muhammad Yamin sebagai subyek kajian, sedangkan sejarah pemikiran Yamin sebagai obyek penelitian. Sedangkan rentang waktu yang penulis pilih ialah pada masa keterlibatan Yamin dalam gerbong pergerakan, sejak usia belia sebagai anggota Jong Sumatranen Bond (JSB), ketika menjadi anggota BPUPKI, hingga keterlibatannya sebagai pejabat publik pada era Indonesia merdeka. Dengan menelusuri proses konstruksi pemikiran serta tindakan Yamin dalam rentang waktu secara biografis itu, penulis hendak menunjukkan bahwa kontribusi Muhammad Yamin dalam perumusan Pancasila tak dapat ditumpukan semata-mata pada rentang ringkas sidang-sidang BPUPKI.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian di atas maka dirumuskan permasalahan yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana konteks historis pemikiran Muhammad Yamin mengenai dasar negara
2. Bagaimana pemikiran Muhammad Yamin mengenai dasar negara

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sebutkan di atas bahwa tujuan utama dari penulisan tesis ini adalah : Untuk mengetahui sejarah serta konstruksi pemikiran Muhammad Yamin terkait dasar negara Indonesia.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi stimulan dan masukan yang dapat menjadi starting point bagi peneliti lain untuk mengkaji dan mengembangkan penelitian ini baik secara lebih mendetail maupun penelitian dari aspek yang berbeda.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis akan terlebih dahulu mencari data yang ada kesamaan dengan apa yang akan ditulis oleh penulis “Muhammad Yamin dalam Perumusan dasar Negara RI”, baik dari tesis, jurnal ataupun karya tulis lainnya yang telah terlebih dahulu dituliskan, adapun penelitian terdahulunya akan penulis sampaikan sebagai berikut adalah :

1. Restu Gunawan, tesis yang berjudul Pemikiran Muhammad Yamin tentang Persatuan Indonesia. (Jakarta, 2003) Universitas Indonesia. Penelitian Ini

menjelaskan bahwa untuk membangun suatu bangsa Indonesia Muhammad Yamin membangunnya melalui bahasa, sejarah, kebudayaan dan sastra serta memandang sejarah terwujudnya Indonesia yang bersatu dan berdaulat di dasarkan atas kesadaran akan kesatuan Indonesia.

2. Syafriadi Asri, tesis yang berjudul Konfigurasi Pikiran Muhammad Yamin dalam kehidupan kenegaraan Indonesia (Jakarta, 2007) Universitas Indonesia. Penelitian ini menjelaskan adanya relevansi proses hasil pemikiran Muhammad Yamin dalam kehidupan kenegaraan Indonesia.

3. Febiana Rima Kainama Penelitian yang berjudul Muhammad Yamin : Upaya menyatukan benang-benang keanekaan dalam simpul persatuan (Jakarta, 2013) yang terdapat dalam jurnal etika sosial dari universitas Atmajaya mendapatkan hasil bahwa bahasa persatuan bukan sebagai identitas namun lebih dari itu sebagai bentuk kesadaran bersama yang harus dibangun dalam keanekaragaman.

Penelitian-penelitian tersebut diatas memiliki kesamaan mengenai perumusan dasar negara yang berasal dari pemikiran Muhammad Yamin yang menitikberatkan pada pokok pikiran persatuan, dan menurut penulis sendiri adanya berbagai penelitian sebaiknya bukan hanya dititik beratkan pada satu pokok pikiran saja namun ada pokok pikiran dan gagasan yang belum di bahas berkaitan dengan rumusan dasar negara secara keseluruhan yang dirumuskan dari gagasan Muhammad Yamin.

Penulis melihat banyak gagasan yang terdapat dalam dasar negara Republik Indonesia yang telah ada yang menjadi bagian kehidupan kenegaraan Indonesia yang

hadir dan berkembang karena adanya gagasan yang inspiratif dari orang-orang yang berjuang demi keberlangsungan bangsa ini dalam merumuskan dasar negara serta terdapat banyak dinamika dalam terbentuknya dasar negara. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kali ini, namun artikel-artikel di atas juga penulis ambil sebagai sumber rujukan atau bahan kajian pustaka dalam penelitian ini.

### **E. Kerangka Teori**

Penulis menggunakan dua acuan teori sebagai pedoman untuk menelaah topik yang dikaji dalam tesis ini. Pertama-tama penulis mengacu pada kerangka teoritik mengenai sejarah pemikiran. Kerangka teoritik ini juga dapat disebut sebagai sebuah model pendekatan penelitian dalam bidang ilmu sejarah. Berdasarkan kerangka berpikir teoritis ini penulis berupaya memahami dan memposisikan gagasan-gagasan Muhammad Yamin dalam periode sejarah Indonesia.

Kerangka berpikir kedua yang penulis jadikan acuan ialah teori perihal konstruksi sosial. Kerangka teoritik dari bidang Ilmu Sosial, khususnya Sosiologi, ini memberi pedoman bagi penulis untuk menganalisis pemikiran Yamin dalam konteks sosial di Indonesia pada periode sejarah tertentu. Berdasarkan teori ini, penulis akan berupaya memahami pemikiran Yamin sebagai individu dalam lingkungan sosial yang melingkupi. Perihal bagaimana Yamin menyerap dan membatinkan kenyataan sosial di sekelilingnya, kemudian mengungkapkannya sebagai gagasan dalam karya-karya tulisnya.

## Sejarah Pemikiran

Tesis ini menggunakan pendekatan sejarah pemikiran (*history of ideas*) dan *intellectual history*. Pendekatan sejarah pemikiran di Indonesia cukup jarang digunakan dalam penelitian mengenai tokoh, aliran, atau gerakan. Pendekatan yang banyak digunakan umumnya adalah pendekatan biografi intelektual (*intellectual biography*), dimana biografi intelektual hanyalah merupakan salah satu bagian kecil dari sejarah pemikiran. Dalam buku Metodologi Sejarah, Kuntowijoyo menyebut bahwa sejarah pemikiran adalah terjemahan dari *history of thought*, *history of ideas*, atau *intellectual history*.

Kuntowijoyo mengacu kepada Stromberg yang mendefinisikan sejarah pemikiran sebagai *the study of the rule of ideas in historical events and process*. Kuntowijoyo berpendapat bahwa sejarah pemikiran mempunyai tiga macam pendekatan, yaitu kajian teks, kajian konteks sejarah, dan kajian hubungan antara teks dengan masyarakat. Dengan tiga jenis pendekatan itu, bisa dilihat bahwa pendekatan sejarah pemikiran telah mencakup apa yang disebut Gordon sebagai sejarah intelektual. Secara lebih jelas, tabel di bawah ini memuat tiga macam pendekatan dalam sejarah pemikiran.

### Tiga Jenis Pendekatan Sejarah Pemikiran

<b>Kajian Teks</b>	1	Genesis Pemikiran
	2	Konsistensi Pemikiran
	3	Evolusi Pemikiran
	4	Sistematika Pemikiran



	5	Perkembangan dan Perubahan
	6	Varian Pemikiran
	7	Komunikasi Pemikiran
	8	Kesinambungan Pemikiran (Internal Dialectics)
<b>Kajian Konteks Sejarah</b>	1	Konteks Sejarah
	2	Konteks Politik
	3	Konteks Budaya
	4	Konteks Sosial
<b>Kajian Hubungan antara Teks dengan Masyarakat</b>	1	Pengaruh Pemikiran
	2	Implementasi Pemikiran
	3	Diseminasi Pemikiran
	4	Sosialisasi Pemikiran

Diolah dari Kuntowijoyo (2003)

Pendekatan sejarah pemikiran, bersama dengan sejarah pengetahuan dan juga sejarah sastra, menurut Foucault lebih bisa memberikan gambaran sejarah mengenai perkembangan, transformasi dan timbulnya formasi baru dibandingkan dengan analisis struktural, meskipun analisis struktural telah berhasil mengungkapkan sejarah dalam temporal jangka panjang.<sup>1</sup> Karena itu, tak mengherankan jika Collingwood, dalam karya klasiknya, *The Idea of History* (1956), menulis bahwa semua sejarah adalah sejarah pemikiran.<sup>2</sup> Tesis ini juga mengadopsi prinsip dalam pendekatan *intellectual history* (sejarah intelektual). Prinsip pendekatan ini memberi ruang yang besar pada aktivitas *interpretations* atas satu gagasan yang muncul dalam kurun

<sup>1</sup> Kuntowijoyo, *ibid.*, hal. 191.

<sup>2</sup> Foucault. 2019. "Arkeologi Pengetahuan". Yogyakarta: BasaBasi.

waktu tertentu di masa lampau. Brian Young melihat *intellectual history* sebagai aktivitas keilmuan yang interdisipliner. Memiliki rajutan yang kuat dengan seni, *literature*, dan ilmu sosial lainnya.<sup>3</sup> Dalam frase yang berbeda, Albert Rossa melihat pendekatan ini sebagai bentuk *hybrid*.<sup>4</sup>

Sementara itu Collini mengartikan pendekatan *intellectual history* sebagai satu pendekatan yang tidak dapat dilepaskan dari tradisi keilmuan sejarah. “*Intellectual history most certainly is a part of history.*” Collini juga berargumen bahwa *intellectual history* adalah alat untuk memahami ide, gagasan, argumentasi, asumsi, dan tingkah laku masyarakat pada masa lampau. Hal ini kemudian diperkuat oleh John W. Burrow yang juga menegaskan bahwa *intellectual history* adalah salah satu bentuk dari keilmuan sejarah itu sendiri.<sup>5</sup>

Pendekatan *intellectual history* mendapatkan sentuhan kuat dari karya Hayden White, *Metahistory: Six Critique, History and Theory*, yang mengemukakan mengenai pendekatan *metahistory*. Pendekatan *metahistory* Hayden White mendefinisikan sejarah sebagai struktur verbal dalam bentuk narasi wacana yang dibangun atas dasar pengalaman masa lampau. White menegaskan bahwa sejarah

---

<sup>3</sup> Collingwood, R.G.1956. “The Idea of History”. Oxford: Oxford University Press.

<sup>4</sup> Young, Brian. 2006. “Introduction” (h. 1-7), *Palgrave Advances in Intellectual History*, ed. Richard Whatmore and Brian Young. Hamshire & NY: Pargrave Macmillan.

<sup>5</sup> Rosa, Alberto. 1996. ”The Past, Intellectual Histories, and Their uses for the Future: A Response to Middleton and Crook”. *Culture Psychology*, 1996, 2: 397.

memiliki pemaknaan yang mendalam terhadap struktur verbal. Di atas rangkaian struktur verbal ini, keilmuan sejarah kemudian dibangun.<sup>6</sup>

Dalam pendekatan White, sejarah merupakan perpaduan antara *poetic* dan *linguistic*. Dalam aktivitas akademik, analisis sejarah tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pendekatan *art*. Meski demikian, bukan berarti sejarah terlepas dari tradisi *science*. Hayden White juga menekankan bahwa sejarah dapat dikaji secara *literature* yang kemudian dianalisis dengan pendekatan-pendekatan *poetic* seperti *metaphor*, *metonymy*, *synecdoche*, *irony*.<sup>7</sup>

Dalam pendekatan *metahistory*, White melihat sejarah sebagai sebuah metodologi yang tidak terbatas hanya pada kegiatan *discovering* atau *finding*, namun melakukan interpretasi atas dasar fakta-fakta yang ditemukan.<sup>8</sup> Sehingga, pendekatan *intellectual history* dan *metahistory* yang digagas Hayden White, mendorong satu tradisi baru dalam keilmuan sejarah dengan segala aktivitas masa lalu segala kompleksitasnya.

## **Konstruksi Sosial**

---

<sup>6</sup> Burrow, John W. 2006. "Intellectual History in English Academic Life: Reflections on a Revolution" (h. 8-24), *Palgrave Advances in Intellectual History*, ed. Richard Whatmore and Brian Young. Hampshire & NY: Palgrave Macmillan.

<sup>7</sup> Jacoby, Russel. 1999. "A New Intellectual History?", di dalam "Reconstructing History: The Emergence of New Historical Society". New York: Routledge. hal. 97.

<sup>8</sup> White. 1980. "Metahistory: Six Critique, History and Theory". Wesleyan University Press, 1980. hal.66-79.

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi yang dicetuskan Berger dan Luckmann.<sup>9</sup> Teori yang berlandaskan paradigma konstruktivisme ini meyakini bahwa realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia bebas yang melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai mesin produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya.

Masyarakat merupakan kenyataan objektif sekaligus sebagai kenyataan subjektif. yakni sebagai kenyataan objektif, masyarakat berada di luar diri manusia dan berhadapan satu sama lain. Sebagai kenyataan subjektif maka individu berada dalam masyarakat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Berger dan Luckmann mengajukan tiga konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan objektif dalam proses dialektika. Tiga konsep tersebut ialah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, objektivasi ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. Dialektika tiga hal ini berlangsung secara serentak.

---

<sup>9</sup> Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 1990. "Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan". Jakarta: LP3ES.

Menurut Berger dan Luckmann masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif yang di dalamnya terdapat proses pelembagaan yang dibangun di atas pembiasaan (habitualisation), yakni tindakan yang selalu diulang-ulang, jika habitualisasi ini telah berlangsung maka terjadilah pengendapan dan tradisi yang akan di ikuti oleh generasi selanjutnya. Dalam realitas objektif terdapat pelembagaan dan legitimasi yang mencakup universum simbolis, yaitu proses objektivasi makna-makna baru (logo, motto, slogan, jargon). Simbol-simbol berfungsi mengintegrasikan makna-makna yang sudah diberikan kepada proses-proses pelembagaan atas interaksi sosial. Sehingga juga dapat berfungsi membuat objektivasi yang sudah dilembagakan menjadi masuk akal secara subjektif. Kerangka teori penelitian menggunakan dua teori tersebut dengan alasan karena penelitian ini melihat ulang pemikiran-pemikiran tokoh yang menjadi dasar dan didudukannya sebagai naskah akademik dari dasar negara serta melihat keterkaitan antara kondisi sosial masyarakat itu dengan idealitas yang ingin dicapai melalui internalisasi.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode merupakan sebuah cara prosedural untuk berbuat dan mengerjakan sesuatu dalam sebuah sistem yang teratur dan terencana. Jadi, terdapat persyaratan yang ketat dalam melakukan sebuah penelitian, yaitu prosedur yang sistematis. metodologi sering disebut sebagai ilmu yang mengkaji tentang metode. Menurut Sartono kartodirdjo, metode dibedakan dengan metodologi metode lebih merupakan cara bagaimana seseorang memperoleh pengetahuan (*How to Know*), Adapun

metodologi memiliki tingkatan yang lebih tinggi karena metodologi ialah mengetahui bagaimana mengetahui (You Know How to Know).

Metodologi harus memperhatikan kerangka pemikiran tentang konsep, kategori, model, hipotesis, dan prosedur umum dalam menyusun sebuah teori.<sup>10</sup> Dalam metodologi penelitian ini, ada tiga aspek yang digunakan terutama dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik penganalisisan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Sejarah Intelektual.

Sejarah intelektual adalah tradisi yang memiliki minat dan perhatian untuk mempelajari sejarah ide-ide, konsep, atau perkembangan intelektual dari khazanah pengetahuan manusia dan kehidupan. Berbeda dengan para ilmuwan yang menguraikan sejarah dari perkembangan janin dalam kandungan, sejarawan intelektual meneliti sejarah pemikiran manusia tentang sesuatu. Dalam metode sejarah intelektual ini menggunakan empat langkah kegiatan yaitu: 1. Mengumpulkan objek dan bahan-bahan, tercetak, tertulis atau lisan yang relevan (heuristik) 2. Menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik (analisis data) 3. menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya (interpretasi data) 4. Menyusun kesaksian yang dapat dipercaya menjadi cerita penyajian yang berarti (historiografi).

#### 1. Jenis dan Sumber data

---

<sup>10</sup> M. Dien Madjid, *Ilmu Sejarah : Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2014), Hlm. 217

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research*. Sementara pengumpulan data penulis menempuh cara dengan menggunakan telaah literatur dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang mempunyai nilai relevansi. Kemudian data yang relevan itu dideskripsikan secara kualitatif. Diantara jenis penelitian adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian eksploratif dan deskriptif. Metode penelitian eksploratif bertujuan untuk memahami eksistensi dan relevansi antara fenomena dalam perilaku sosial secara komprehensif. Sedangkan metode penelitian deskriptif bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks suatu kesatuan yang integral. Dalam objek penelitian ini yang menjadi objek adalah teks-teks tertulis yang menerangkan atau mengandung gagasan tertentu. Karena itu penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kepustakaan atau *Library Research*.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, dimana data-data yang disajikan dalam bentuk verbal (kata-kata) tidak dalam bentuk angka yang biasa disebut sebagai data statistik. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri ide-ide, karya-karya serta pemikiran Muhammad yamin mengenai dasar negara.

## 2. Pengumpulan Data (Heuristik)

Heuristik berasal dari bahasa Yunani, *heuristiken* yang berarti menemukan atau mengumpulkan sumber. Dalam kaitannya dengan sejarah yang dimaksud adalah sumber sejarah yang tersebar berupa catatan, kesaksian, dan fakta fakta lain yang

dapat memberikan penggambaran tentang sebuah peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia.<sup>11</sup>

Penulisan sejarah tak mungkin dapat dilakukan tanpa Tersedianya sumber sejarah. Bahan-bahan sebagai sumber sejarah kemudian dijadikan alat, bukan tujuan. Dengan kata lain, orang harus mempunyai data lebih dahulu untuk menulis sejarah. Kajian tentang sumber-sumber ialah suatu ilmu tersendiri yang disebut heuristik.

Sumber-sumber sejarah dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 kategori yaitu : 1. Sumber kebendaan atau materiil, yaitu sumber sejarah yang berupa benda yang dapat dilihat secara fisik. Sumber ini dapat dibedakan menjadi sumber tertulis seperti dokumen, arsip, surat, catatan harian, foto, dan file mengenai tokoh yang berkaitan dengan Muhammad Yamin. 2. Sumber tulisan berupa kesaksian yang terkait terhadap tokoh Muhammad Yamin 3. Sumber non kebendaan atau immateril dapat berupa tradisi atau tradisi keagamaan yang terkait dengan tokoh tersebut.<sup>12</sup>

Adapun teknik pengumpulan data yang akan diteliti adalah dengan cara mengumpulkan semua sumber data dalam bentuk buku-buku dan karya ilmiah Muhammad Yamin yang berkaitan dengan topik penelitian. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengklarifikasian data dengan mengelompokkan data-data sesuai dengan jenisnya, baik data primer maupun data sekunder.

---

<sup>11</sup> Nor Huda Ali, *Teori dan Metodologi Sejarah : Beberapa Konsep Dasar*, (Palembang : Noer Fikri, 2016), Hlm. 175

<sup>12</sup> M. Dien Madjid, *Ilmu Sejarah : Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2014), Hlm. 219-220



### 3. Teknik Analisis Data (Verifikasi)

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskan, mencari dan menemukan pola, serta menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang dihasilkan dari berbagai sumber, diantaranya dokumen yang terkait dengan penelitian.<sup>13</sup>

Tahap berikutnya mengadakan pemeriksaan keabsahan data mulailah dengan tahap penafsiran data dalam mengelolah hasil sementara menjadi teori subtansif dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis data kualitatif menurut *Miles* dan *Hubermen* meliputi tiga tahap, yaitu: 1) tahap reduksi data, 2) tahap penyajian, 3) tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah dengan tahap penafsiran data dalam mengelolah hasil sementara menjadi teori subtansif dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Setelah semua tahap selesai dilakukan, peneliti menganalisis dengan

---

<sup>13</sup> Ibid, Hlm.121

cara menguraikan atau menjelaskan secara keseluruhan permasalahan berdasarkan data yang didapat.

#### 4. Interpretasi Data

Setelah fakta-fakta disusun, kemudian dilakukan interpretasi. Interpretasi sangat esensial dan krusial dalam metodologi sejarah. interpretasi atau penafsiran sejarah menurut Kartodirjo merupakan penggunaan konsep secara teori yang ada pada disiplin ilmu sejarah.<sup>14</sup> Sejarah sering dideskripsikan sebagai peristiwa-peristiwa masa lalu sebagaimana peristiwa itu benar-benar terjadi secara aktual. Fakta-fakta sejarah yang berhasil dikumpulkan belum banyak bercerita. Fakta-fakta tersebut harus disusun dan digabungkan satu sama lain sehingga membentuk cerita peristiwa sejarah. Hubungan antar fakta untuk melanjutkan pekerjaan melakukan interpretasi.<sup>15</sup> Dalam sejarah, fakta-fakta yang tersedia sangat terbatas dan tidak dapat diulang serta di implementasikan sesuai keinginan. Oleh karenanya data dan fakta-fakta sejarah tentang Muhammad Yamin yang telah dikumpulkan perlu untuk diinterpretasikan. Pada langkah ini, penulis berusaha menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh kemudian diberi penafsiran untuk merekonstruksi peristiwa sejarah sehingga dapat dipahami.

#### 5. Historiografi

---

<sup>14</sup> Kartodirjo, *Sartono Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993). Hal. 20

<sup>15</sup> M. Dien Madjid, *Ilmu Sejarah : Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Kencana, 2014), Hlm. 225

Pada tahap akhir dalam melakukan penelitian sejarah ialah historiografi, yaitu merekonstruksi suatu gambaran di masa lampau berdasarkan data-data yang telah diperoleh di lapangan.<sup>16</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dituangkan kedalam lima bab, termasuk pendahuluan dan penutup serta lampiran-lampiran yang berkaitan satu dengan lainnya secara sistematis yaitu sebagai berikut : Bab pertama, Pendahuluan yakni latar belakang alasan pemilihan topik penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metodologi yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab kedua, Kehidupan dan karir politik Muhammad Yamin yang di dalamnya berisikan asal usul keluarga, pendidikan dan lingkungan, aktivitas dan karir serta karya-karya yang dihasilkan.

Bab ketiga, Menjelaskan konteks historis pemikiran Muhammad Yamin mengenai dasar negara

Bab keempat, Menganalisis tentang prinsip-prinsip dasar dari pemikiran Muhammad Yamin.

Bab kelima, Kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>16</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wicana. 1994). Hal. 89

## **BAB II**

### **KEHIDUPAN DAN KARIR POLITIK MUHAMMAD YAMIN**

Studi tentang riwayat hidup seseorang tokoh secara mendalam sebelum mengetahui pemikirannya sangat diperlukan, karena dengan cara demikian dapat diketahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi corak pemikiran tokoh tersebut. Latar belakang menulis biografi tidak lain karena selain ingin mengikuti kisah hidup seorang tokoh tersebut, adalah pola untuk meneladani dan memahami kunci kesuksesan dari tokoh. Biasanya biografi terdiri dari riwayat hidup, pengalaman, serta pemikiran seorang tokoh. Studi tentang tokoh adalah pengkajian secara sistematis terhadap suatu pemikiran atau gagasan seorang pemikir, keseluruhannya atau sebagiannya. Pengkajian meliputi latar belakang internal, eksternal, perkembangan pemikiran, hal-hal yang diperhatikan, kekuatan dan kelemahan tokoh tersebut serta kontribusinya bagi zaman ketika masih hidup ataupun sesudahnya.<sup>17</sup>

#### **A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan**

##### **1. Latar Belakang Keluarga**

Talawi adalah sebuah nagari yang menjadi ibukota kecamatan dalam kodya Sawahlunto Sumatera Barat yang terletak ditepi sungai batang Ombilin, di kota kecil ini Muhammad Yamin dilahirkan tepatnya pada hari kamis, tanggal 22 agustus 1903 pukul 24.00, Ayahnya bernama Usman gelar Baginda Khatib, sebagai seorang pegawai mantri kopi.

---

<sup>17</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan biografi*, ( Jakarta : Preneda, 2014), Hlm.7

Pada zaman penjajahan Belanda kedudukan pegawai seperti ini termasuk orang yang terpandang, melihat nama orang tuanya yang bergelar baginda bahwa dapat dipastikan orang tua Yamin berasal dari kalangan ulama Minangkabau.<sup>18</sup> Sebagai ulama beliau bermubaligh di daerah Kuantan, Kampar Indragiri sampai meninggal di Indrapura sebelah selatan Painan. Ibunda Muhammad Yamin bernama Siti Saadah berasal dari Padang Panjang, keturunan rakyat biasa yang hidup dari bertani dan berladang. Ibunda Yamin merupakan istri kedua dari baginda Khatib. Dari istri tertua lahirlah Muhammad Yaman dengan gelar Rajo Endah. Ia masuk sekolah guru di Bukit Tinggi dan akhirnya menjadi guru dan kemudian bertugas sebagai guru. Muhammad Yaman menjadi orang tua asuh dari adik-adik dan keponakannya termasuk Muhammad Yamin karena sejak kecil telah ditinggalkan kedua orang tuanya sehingga ia harus ikut kakaknya Muhammad Yaman.

Muhammad Yamin besar dan tinggal bersama saudara-saudaranya, diantaranya Muhammad Yaman (seorang pendidik), Djamaludin Adinegoro (seorang wartawan termuka), dan Ramana Ustman (pelopor korps diplomatik Indonesia). Selain itu Mohammad Amir sepupunya merupakan tokoh Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari yaitu seorang putri bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa tengah dan dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai seorang putra bernama Daan Rahadian Sinayangsih Yamin.

---

<sup>18</sup> Welmar, *Mengenang Maha putra Prof Mr. Muhammad Yamin Pahlawan nasional RI*, (Bukit Tinggi : CV.Kristal Multimedia, 1997), Hlm. 39

## 2. Pendidikan

Dunia pendidikan Yamin tidak berjalan lurus dan berliku-liku dari satu sekolah ke sekolah berikutnya, sehingga jadwalnya tidak diselesaikan pada waktunya, mengawali pendidikan di sekolah melayu yakni sekolah dasar bumi putera kemudian mendapatkan pendidikan pertamanya di *Hollandsch Inlandische School* (HIS) Lahat, *Normal School* (Sekolah Guru), kemudian pernah sekolah kedokteran hewan dan pertanian di Bogor. Dari mempelajari fauna, Yamin mencoba beralih membedah kehidupan flora Kendati menyukai alam pegunungan dan hamparan sawah menghijau, pelajaran tentang agronomi tak lantas menarik perhatiannya, sehingga tidak bertahan lama. Setelah itu melanjutkan ke *Algemeene Middelbare School* (AMS) Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, disini Yamin mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa.

Satu-satu perguruan tinggi yang menampung alumnus AMS hanya *Rechts Hegesschool*, Sebelumnya, jenjang pendidikan kesarjanaaan atau Universitas hanya ada di Belanda, misalnya Universitas *Leiden*. Namun Universitas di negeri Kincir Angin itu hanya menerima alumnus *Hogere Burgerschool*, sekolah sejenis AMS yang khusus menampung siswa anak keturunan Belanda, Tionghoa, dan *elite* pribumi.<sup>19</sup>

*Algemeene Middelbare School* (AMS) sebagai sekolah kelas dua yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk pribumi bukan priayi, terlepas dari

---

<sup>19</sup> Ibid, Hlm. 47

persyaratan itu, Yamin termasuk anak keluarga terpandang yang tidak memuja pendidikan barat. Padahal mayoritas orang minang memiliki orientasi pendidikan berkiblat ke Barat, bagi Yamin daya tarik mengenyam pendidikan di sekolah hukum karena ada mata kuliah ilmu filsafat dan mulai masuk perguruan tinggi hukum pertama di tanah air pada tahun 1927. Setelah itu kemudian melanjutkan kuliah di Recht Hogeschool (RHS), sekolah tinggi hukum Hindia Belanda yang kemudian menjadi fakultas hukum Universitas Indonesia, Yamin berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten pada tahun 1932.<sup>20</sup>

## **B. Riwayat Perjuangan Muhammad Yamin**

Mr. Muhammad Yamin Mengikuti jejak saudara-saudaranya, aktif di organisasi pemuda asal Sumatera, serta ikut mendirikan perkumpulan Indonesia muda. Ia pernah menjadi ketua *Jong Sumateranen Bond* (1926-1928). Jong Sumateranen merupakan salah satu tonggak keterlibatan pemuda Andalas dalam gerakan persatuan Indonesia. Dalam perkumpulan inilah Muhammad Yamin mula-mula mengenal organisasi dan belajar berpolitik. Organisasi ini didirikan pada 9 Desember 1917 oleh pelajar sekolah kedokteran STOVIA asal Sumatera di Jakarta. Mereka mengikuti jejak pemuda Jawa yang mendirikan Tri Koro Dharmo yang artinya Tiga Tujuan Mulia: sakti, budi, bakti pada tahun 1915, yang belakangan ini berubah menjadi *Jong Java*. Tujuan Jong Sumateranen diantaranya

---

<sup>20</sup> Meester in de Rechten (disingkat Mr.) adalah sebuah gelar yang diperoleh seseorang setelah menyelesaikan studinya dalam ilmu hukum pada sebuah universitas yang mengikuti sistem yang berlaku di Belanda dan Belgia. Dalam bahasa Belanda gelar ini berarti Magister dalam ilmu hukum pada praktiknya gelar ini biasa ditulis sebagai Meester saja.

memperkuat ikatan antar pelajar asal Sumatera yang juga membangun kesadaran bahwa mereka kelak akan menjadi pemimpin, Yamin mengenal Jong Sumateranen dari Nazir Datuk Pamuntjak. Pada masa di Jawa Yamin mulai aktif terlibat dalam Jong Sumateranen. Mula-mula berkecimpung di Jong Sumateranen pada awal 1920-an, dan belum meyakini paham kebangsaan Indonesia. Wawasan politik dan kebangsaannya masih sekitar Andalas. Seiring perjalanan dan bertambahnya usia serta semakin luasnya pergaulan, cakrawala pemikiran Muhammad Yamin terbuka. Ketika Lustrum I Jong Sumatera Bond berlangsung di Jakarta pada tahun 1923, ia mulai menggelorakan semangat ke-Indonesiaan. Dalam pidatonya yang berjudul "*De maleische taal in het verleden, heden en toekomst*" (Bahasa Melayu di masa lampau, sekarang dan masa datang), ia mengemukakan idenya mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Indonesia meskipun pidatonya sendiri masih dibawakan dalam bahasa Belanda. Sesuai Lustrum tersebut Yamin dipercaya menjadi ketua Jong Sumateranen Bond periode 1926-1928. Padahal belum lulus dari AMS, pada periode tersebut pengaruh Yamin di Jong Sumateranen Bond sangat penting dan sangat berperan dalam Kongres Pemuda I dan II, Oleh karena itu Muhammad Yamin dijuluki dengan Nahkoda terakhir Jong Sumatera Bond.<sup>21</sup>

Pada tahun 1931 Yamin masuk ke partai Indonesia yang bersikap kooperatif dengan penjajah. Setelah partai ini bubar lalu mendirikan Partai

---

<sup>21</sup> Gunawan Muhammad, *Mr. Muhammad Yamin*, (Jakarta: Majalah Tempo yang dirilis 18 Agustus 2014), Hlm.70



Gerakan Rakyat Indonesia bersama Wilopo, Amir Syarifuddin, Sumanang, Adnan Kapau Gani dan Adam Malik pada tahun 1936. Dengan taktik politik kooperatif tetapi sebenarnya menyusun strategi untuk melawan Belanda yang akhirnya mengantarkan ke *volksraad* (dewan rakyat bentukan Belanda). dan pada tahun 1939 membentuk golongan Nasional Indonesia dalam *volksraad*.<sup>22</sup>

Semasa pendudukan Jepang (1942-1945), Muhammad Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang serta merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI Yamin berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara, Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah bekas Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan tahun 1949 dipercaya sebagai penasehat delegasi Indonesia ke Konfrensi Meja Bundar.

### **C. Karya dan Karir Politik Muhammad Yamin**

Muhammad Yamin adalah orang yang sangat gemar membaca, dari kegemarannya itu menjadikannya menguasai bahasa melayu. Selain gemar membaca, ia pun gemar menulis dengan tulisan tangan sebelum tulisannya itu dipindahkan lewat mesin ketik. Kegemarannya menulis telah tumbuh sejak kecil saat berada di Sumatera. Namun, namun saat berada di Jawa tulisannya mulai di

---

<sup>22</sup> Ibid, Hlm.73

publikasikan. Pada tahun 1920, puisinya berjudul “Tanah Airku” dimuat dalam majalah milik Jong Sumantranen Bond. Sebelumnya tulisan-tulisan yang terbit di majalah yang digagas oleh mahasiswa asal Sumatera Timur di STOVIA selalu berbahasa Belanda. Tulisan Muhmamad Yamin berkembang tak sebatas puisi, tetapi juga menulis sonata (Indonesia Tumpah Darahku: 1929) dan naskah drama (Ken Arok dan Ken Dedes: 1934), juga menerjemahkan karya *Tagore* dan *Shakespeare*, serta genre lain seperti novel sejarah Gadjah Mada (1948).<sup>23</sup>

Muhammad Yamin juga belajar sastra timur di Jawa, Di AMS Yamin belajar kebudayaan dan sejarah kesenian juga mempelajari kesusastraan Jawa dan Melayu. Kemampuannya menguasai sejumlah bahasa juga terasah di AMS Solo, fasih berbahasa Belanda, Jerman, dan Perancis. Menariknya selain menguasai bahasa-bahasa asing, ia pun belajar dan menguasai bahasa sansakerta, karena pada saat itu Yamin merasakan rumitnya berinteraksi dengan masyarakat setempat (Solo) karena mereka menggunakan bahasa Jawa yang bertingkat. Ada bahasa Jawa Bagongan (yang digunakan di dalam Keraton), ada Jawa Krama Inggil, Jawa Krama Alus, Jawa Ngoko Alus, dan Jawa Ngoko Lugu. Bahasa Jawa ini bersifat feodal tidak egaliter dan inilah pijakan untuk mengusulkan Melayu agar jadi dasar bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.

Pada 28 oktober 1928, himpunan puisi kedua berjudul tumpah darahku kembali diterbitkan. Pada tahun yang sama karyanya dalam bentuk drama dengan

---

<sup>23</sup> Ibid, Hlm.75

judul ken Arok dan ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa juga muncul selain itu juga telah menerbitkan banyak karya dalam bentuk drama, esei, novel sejarah, dan menerjemahkan karya-karya William Shakespeere serta dapat dipetakan dalam jagat sastra Indonesia namun periode Yamin dalam dunia sastra relatif singkat karena lebih di fokuskan pada dunia politik.

Harapan Muhammad Yamin bagi Indonesia sangat besar melebihi Sriwijaya atau Majapahit pada masa lampau yang terdapat dalam ikon Gadjah Mada, yang bercita-cita mempersatukan Nusantara. Walaupun orang Minang namun yamin terpesona pada Jawa dan kebesaran Majapahit sehingga berusaha mempelajari kebudayaan Jawa dan menguasai bahasa Sansakerta. Muhammad Yamin terlibat aktif dalam Kongres Pemuda I (30 April-2 Mei 1926). Dalam pertemuan pertama itu pun Yamin mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dan selanjutnya pada kongres pemuda II menggagas perumusan naskah konsep Sumpah Pemuda, yakni : *Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.*<sup>24</sup>

Setelah mengemukakan gagasan mengenai wilayah Indonesia dan mengusulkan Sumpah Pemuda, Yamin memiliki andil dalam pembuatan lambang Garuda Pancasila dan syair Indonesia Raya juga dipercaya menemukan kata

---

<sup>24</sup> Ibid, Hlm. 81

“Pancasila” itu sendiri. Muhammad Yamin berperan dalam merancang lambang Negara pada akhir tahun 1949. Pada pengujung Konferensi Meja Bundar di Den Haag, pemerintah kerajaan Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang di proklamasikan empat tahun sebelumnya. Perjuangan panjang mempertahankan kemerdekaan berbuah manis. Setelah itu presiden Soekarno bergegas berbenah menyiapkan segala perangkat tata Negara yang sebelumnya terabaikan.

Pada tahun 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menugaskan untuk meneliti pola dan lambang dalam peradaban Indonesia. Panitia Indonesia Raya kemudian mengusulkan satu lambang sebagai simbol Negara baru ini, setelah mendapat mandat untuk mencari lambang negara dari Sultan Hamid II, Yamin menggandeng Ki Hajar Dewantara untuk menyelusuri situs-situs purbakala dan mempelajari kesusastraan kuno di beberapa wilayah di Indonesia. Akhirnya mereka menemukan sosok burung Garuda di Candi Kidal, Candi Prambanan, dan Candi Mendut selain karena sosoknya yang perkasa, garuda dipilih karena ada mitologi yang mendukung keberadaanya sebagai pelindung Negara.

Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara kemudian meminta bantuan seorang seniman, Basuki Reksobhowo untuk membuat sketsa dari berbagai relief tersebut. Upaya perumusan lambang Negara ini terhenti karena gentingnya situasi politik dan keamanan pada tahun-tahun pertama pasca kemerdekaan itu, pada tahun 1947. Upaya itu bergulir kembali ketika pemerintah mengundang para seniman

mengikuti sayembara pembuatan lambang negara tersebut.

Pada tahun 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menugaskan untuk meneliti pola dan lambang dalam peradaban Indonesia. Panitia Indonesia Raya kemudian mengusulkan satu lambang sebagai simbol Negara baru ini, setelah mendapat mandat untuk mencari lambang negara dari Sultan Hamid II, Yamin menggandeng Ki Hajar Dewantara untuk menyelusuri situs-situs purbakala dan mempelajari kesusastraan kuno di beberapa wilayah di Indonesia. Akhirnya mereka menemukan sosok burung Garuda di Candi Kidal, Candi Prambanan, dan Candi Mendut selain karena sosoknya yang perkasa, Garuda dipilih karena ada mitologi yang mendukung keberadaannya sebagai pelindung Negara.

Muhammad Yamin dan Ki Hajar Dewantara kemudian meminta bantuan seorang seniman, Basuki Reksobhowo untuk membuat sketsa dari berbagai relief tersebut. Upaya perumusan lambang Negara ini terhenti karena gentingnya situasi politik dan keamanan pada tahun-tahun pertama pasca kemerdekaan itu, pada tahun 1947. upaya itu bergulir kembali ketika pemerintah mengundang para seniman mengikuti sayembara pembuatan lambang negara tersebut.

Kembali pada gagasan mempersatukan Indonesia saat itu terdapat dua pilihan yaitu bersatu atau porak poranda sama sekali oleh karena itu ikon Gajah Mada, maha patih yang pernah bersumpah untuk menyatukan nusantara menjadi satu tujuan. Lebih dari sekedar memetik gagasan panglima perang Majapahit maka Yamin merasa perlu mencari raut wajah Gajah Mada. Ia memungutnya dari

gambar yang tertera pada celengan terakota yang dipercaya datang dari era Majapahit. Wajah Gadjah Mada yang disodorkan Muhammad Yamin menjadi ketetapan umum setelah ia menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1953. Saat itulah tafsir Gadjah Mada masuk kurikulum pendidikan dan buku-buku sejarah, termasuk dalam penulisan sejarah Majapahit. Muhammad Yamin mencari informasi mengenai Gadjah Mada baik dari prasasti maupun datang langsung ke Trowulan.

Semangat nasionalisme Yamin ini dinilai sejalan dengan kondisi Indonesia yang ketika itu tengah butuh sejarah untuk modal pergerakan nasional. Bagi Muhammad Yamin benar atau tidaknya sejarah yang dia dapat itu urusan belakangan, yang penting sejarah tersebut bisa dipakai untuk acuan pergerakan nasional. Penulisan penelitian dengan sampul buku yang berjudul “Gadjah Mada: Pahlawan Persatuan Nusantara” yang diterbitkan Balai Pustaka pertama kali pada tahun 1945 menjadi salah satu karya yang menceritakan mengenai pendapat wajah Gadjah Mada lebih yang mirip Bima yang di arcaikan dan perjalanan cerita menjelang keruntuhan Majapahit pada abad ke-15.

Karangan Yamin tentang Gadjah Mada ini mengandung makna menginginkan bangsa Indonesia dapat memperjuangkan kemerdekaannya dan setia melaksanakan persatuan tumpah darah dan Negara sehingga bangsa Indonesia selalu senantiasa merdeka, bersatu dan jaya.<sup>25</sup> Perjuangan yang lamanya

---

<sup>25</sup> Djunaedi, Muhammad Yamin “Penggagas Indonesia yang dihujat dan dipuji”, (Jakarta : KPG, 2016), Hlm.131

empat puluh tahun itu akan mendapat penerangan, jejak-jejak yang dapat di selidiki diatas jalan yang di rintis pemimpin kebangsaan itu dalam usaha persatuan menuju kebesaran nusa, bangsa dan Negara. Selanjutnya salah satu isi dari karya Muhammad Yamin yang menceritakan Gajah Mada beserta perjuangannya pada masa kerajaan Majapahit.

Muhammad Yamin menulis ribuan halaman tentang tata Negara Majapahit. Sudah sejak mahasiswa membulatkan keinginan membuat buku tentang macam-macam praktek tata Negara yang pernah berlangsung di wilayah Nusantara. Sudah lama pula menyimpan hasrat menulis sejarah Nusantara dalam bahasa Indonesia. Saat itu belum ada buku sejarah yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Walaupun Yamin telah menciptakan banyak buku tentang sejarah Majapahit yang akurat dalam terjemahannya namun masih menuai banyak kritik kendatipun berperan sekali dalam penulisan sejarah Majapahit. Selain itu Muhammad Yamin juga adalah perintis puisi Indonesia modern, dalam perkembangan sastra merupakan penyair yang mempopulerkan bentuk soneta berupa puisi. Muatan pesan puisi itu menekankan semangat cinta tanah air tapi dalam puisi tersebut masih merujuk ke Sumatera bukan Indonesia.

Tanah air menjadi tonggak perjalanan Yamin sebagai sastrawan dan memperkenalkan bentuk puisi baru yang tidak mengikuti pakem lama yang berjumlah enam atau delapan baris. Puisi “Tanah Air” terdiri atas tiga bait. Satu bait bisa Sembilan baris ada sejarawan dan arkeolog lain untuk menulis sejarah

dalam bahasa Indonesia. atau jumlah ganjil bukan genap Bentuk puisi baru yang disuguhkan. Saat itu para penyair di Tanah Air baik penyair Melayu ataupun Melayu Tionghoa belum ada secara serius memilih bentuk soneta dalam sajak-sajaknya.

Muhammad Yamin adalah orang pertama yang paling setia dengan bentuk soneta dalam karya-karya puisinya. Karena itu, sumbangan Muhammad Yamin yang sangat penting dalam dunia sastra Indonesia adalah bentuk soneta yang digunakan dalam sajak-sajaknya. Soneta-soneta yang dibuat dimuat dalam surat kabar Jong Sumatera pada tahun 1920-an.<sup>26</sup> Selain membuat puisi Tanah Air, Muhammad Yamin menulis soneta seperti puisi yang berjudul Permintaan, Cita-cita, dan Niat. Tulisan tentang Tanah Air sendiri kemudian diterbitkan dalam buku puisi yang berjudul Tanah Air pada 9 Desember 1922. Buku ini terdiri atas 30 bait dan tiap bait terdiri atas 9 baris, penerbitan buku ini untuk menyambut peringatan lima tahun berdirinya Jong Sumateranen Bond pada tanggal 26 Oktober 1928.

Dua hari menjelang kongres pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda Yamin telah menerbitkan buku puisinya yang kedua yakni Indonesia Tumpah Darahku. Buku itu terdiri atas 88 bait dan tiap bait terdiri atas 7 baris, yang menarik puisi-puisi Muhammad Yamin dalam buku yang kedua terjadi perubahan pesan tema nasionalisme yang disampaikan mengandung maksud tanah air dan tanah tumpah darah tidak lagi sebatas Sumatera, tapi berubah menjadi Indonesia.<sup>27</sup>

Karya-karya soneta Mr. Muhammad Yamin pun kemudian kian populer dan

---

<sup>26</sup> Ibid, Hlm. 79

<sup>27</sup> Ibid, Hlm. 85



diikuti oleh para penyair Pujangga Baru, yang muncul bersamaan dengan terbitnya majalah *Pujangga Baru* pada Juli 1933, yang dipelopori Sutan Takdir Alisjahbana. Bisa dikatakan Yamin adalah salah satu pelopor puisi Indonesia modern. Sebab jauh sebelum majalah Pujangga Baru terbit, Yamin telah menulis puisi dengan pakem modern. Bila di petakan dalam jagad sastra Indonesia, Yamin berada diantara sastrawan Balai Pustaka dan Pujangga Baru.

Kesamaan Yamin dengan para penyair Pujangga Baru karena kecenderungan kearah romantisisme Eropa. Romantisisme itu mengagungkan alam, jadi alam merupakan tumpuan dan pemikiran mereka. Alam sebagai satu kesatuan yang utuh, kecintaan pada dunia sastra bertunas saat dia masih sejak kecil. Terlebih buku yang ditulis menggunakan gaya bahasa nan indah dan tidak mau melepaskan buku itu sebelum selesai dibaca saat malam hari ia kerap membaca buku di bawah lampu penerangan di pinggir jalan.

Kecintaannya terhadap sastra kian menemukan jalannya ketika ia memasuki AMS di Surakarta pada tahun 1929. Salah satu bait sajak Muhammad Yamin yang ditulis ketika usianya masih belasan tahun di majalah Jong Sumatera berbunyi: *Sampai mati berkalang tanah Lupa ke bahasa tiadakan pernah Ingat pemuda, Sumatera malang Tiada bahasa, bangsa pun hilang.* Ada tiga kata kunci dalam kutipan itu: “bahasa”, “Sumatera”, dan “Bangsa”.

Majalah yang memuat sajak Muhammad Yamin itu adalah media dari sebuah organisasi pemuda asal Sumatera, yang pada awalnya memang mendasarkan pandangannya pada prinsip teritorialisme dan bukan primodialisme. Sumatera adalah

sebuah teritorial yang mencakup sejumlah suku bangsa yang masing-masing memiliki adat, bahasa dan budaya. Masalah dasar yang boleh diperkarakan berkenaan dengan organisasi itu adalah justru aspek bahasa. Jong Sumateranen Bond itu merupakan bahasa Belanda, bahasa yang disuratkan dalam sajak Yamin tentulah bahasa melayu. Sajak itu mengajak pemuda Sumatera menggunakan bahasa Melayu dalam komunikasi, bukan bahasa Belanda yang mereka pelajari di sekolah, meski tetap digunakan sebagai nama organisasi. Bangsa yang dikaitkan dengan bahasa dalam sajak itu adalah Melayu.<sup>28</sup>

Bahasa itu dianggap berlaku untuk semua suku bangsa karena dalam kenyataannya suku-suku bangsa yang memiliki bahasa berlainan harus sepakat menggunakan sebuah bahasa sebagai sarana komunikasi. Dalam sajak yang sama Muhammad Yamin menulis: *Dalam bahasa sambungan jiwa Di mana Sumatera di situ bangsa , Di mana perca di situ bahasa.*

Mula-mula memang demikian adanya bahasa yang diperjuangkan agar menjadi pilihan pemuda dalam organisasinya hanya dikaitkan dengan Sumatera dan Perca. Namun, pikiran yang masing kosong diisinya dengan pengetahuan, pengalaman, dan penghayatan baru yang pada akhirnya mengubah pikirannya hingga pada tahap yang paling mendasar. Bahasa adalah komunikasi, kebudayaan adalah komunikasi, jadi bahasa adalah kebudayaan. Itulah sebenarnya masalah kita saat ini, yang dicoba diselesaikan dalam kongres pemuda pada tahun 1928 dengan menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu

---

<sup>28</sup> Ibid, Hlm.91

sebabnya harus dijunjung tinggi. Butir ketiga keputusan kongres itu adalah menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.<sup>29</sup>

Kongres tidak pernah mengatakan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa. Muhammad Yamin sangat berperan dalam memecahkan masalah gawat tersebut, ketika itu ia merupakan sekretaris kongres pemuda dengan ketua Djojopoespito. Dalam proses semacam itu bisa dijadikan contoh mewakili anak muda cerdas yang datang dari berbagai daerah ke Jawa untuk belajar. Ia belajar segala jenis ilmu yang disediakan pemerintah. Masa lampau memang berlangsung di mana-mana tapi di Jawa para pujangga sejak mengenal aksara telah merekamnya lebih dari yang terjadi di daerah lain. Hal ini tentu tak lain argumentasi yang bisa diberikan mengapa Yamin menulis buku seperti: *Gadjah Mada dan Pangeran Di Ponegoro*.

Kontribusi yang sangat penting bagi perkembangan sastra Indonesia adalah bentuk soneta yang digunakannya dalam sebagian besar sajaknya. Muhammad Yamin menyiarkan sajak soneta-sonetanya dalam majalah Jong Sumatera pada saat masa penjajahan, hampir tidak ada penyair di majalah Pujangga Baru yang luput dari ciptanya. Karya dan kiprahnya membuat bangga rakyat, namun periode Yamin dalam dunia sastra relatif singkat dan tidak lagi banyak menulis karya sastra, terutama puisi di karenakan waktunya lebih banyak dicurahkan di dunia politik dan menjadi bagian dari salah satu anggota badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

---

<sup>29</sup> Ibid, Hlm.95

### **BAB III**

#### **SEJARAH PERUMUSAN DASAR NEGARA**

##### **A. Masa sidang pertama BPUPKI**

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tak resmi yang keseluruhannya berlangsung di Jakarta sebelum kekalahan kaisar Jepang terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sidang-sidang resmi di adakan untuk membahas masalah dasar negara, wilayah negara, kewarganegaraan serta rancangan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh ketua BPUPKI Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat. Sidang pertama berlangsung 28 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara sedangkan sidang kedua berlangsung antara 10 sampai dengan 17 juli 1945 yang membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi keuangan, pembelaan, dan pengajaran.<sup>30</sup>

Mengenai sidang tidak resmi, yang hanya dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI berlangsung pada masa reses antara sidang pertama dan kedua, sidang tersebut membahas rancangan pembukaan UUD 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI, Ir. Soekarno. Mengenai sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sampai sekarang boleh dikatakan tak mengundang perdebatan, hal ini berbeda dengan sidang BPUPKI, dalam sidang

---

<sup>30</sup> Sutrisno Kutoyo, *Muhammad Yamin, "Cita-cita dan Perjuangan seorang Bapak Bangsa"*, ( Jakarta : Mutiara Sumber Wijaya, 2004), Hlm. 148

empat hari tersebut banyak pendapat mengenai dasar Indonesia merdeka, dari pendapat-pendapat tersebut pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, pidato Muhammad Hatta pada tanggal 30 Mei, Seopomo pada tanggal 31 Mei, dan Ir. Soekarno berpidato pada tanggal 1 Juni 1945.

Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan beberapa dasar negara. Pemikirannya dirangkai dalam satu judul yakni *Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia* yang intinya sebagai berikut:

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kejahteraan rakyat

Setelah melalui sidang-sidang alot dan perdebatan sengit, akhirnya BPUPKI mengadakan sidang kembali dan membentuk Panitia kecil yang disebut juga panitia sembilan, dengan beranggotakan KH. A. Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir Soekarno Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Soebarjo dan A.A. Maramis. Menghasilkan suatu kesepakatan ditandatangani oleh seluruh anggota pada tanggal 22 Juni 1945, dan dituliskan dalam suatu piagam yang disebut oleh Mr. Muhammad Yamin dengan nama *The Djakarta Charter*, dan diistilahkan oleh

Sukiman dengan nama *Gentleman's Agreement*. Kini lebih dikenal dengan nama *Piagam Jakarta*.<sup>31</sup>

Selanjutnya Piagam Jakarta tersebut melalui Sidang BPUPKI diterima oleh seluruh anggota BPUPKI, bahkan disepakati untuk dijadikan sebagai *Preambul* (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 atau Pernyataan Kemerdekaan Indonesia, yang di dalamnya berisikan Rumusan Pancasila dengan susunan redaksi dan sistematikanya sebagai berikut :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pendiri bangsa ini telah sepakat bahwa Indonesia bukanlah negara agama melainkan negara beragama, Indonesia juga termasuk negara yang tengah-tengah yakni negara yang tidak menganut paham kiri dan paham kanan, terbukti pemberontakan PKI, DII dan NII berhasil ditumpas. Pendiri bangsa ini mengetahui meskipun Indonesia mayoritas Islam tetapi masyarakat Indonesia heterogen berbagai macam suku, ras, dan agama ada di Indonesia.

---

<sup>31</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung : Pustaka Salman, 1981), Hlm. 25

Hal ini sangatlah tepat, jika Indonesia tidak menganut salah satu paham, entah paham kiri, maka paham kanan akan memisahkan diri. Kemudian jika Indonesia menganut negara agama maka Indonesia bagian timur akan melepaskan diri, pasalnya bagian timur beragama bukan selain Islam. Meskipun Indonesia bukan negara agama, namun semua agama di Indonesia diakui dan di perlakukan secara baik.

Hakekat dasar Indonesia adalah hasil kesepakatan bersama antara orang beragama dan masyarakat seluruhnya. Ditambah tokoh agama mampu menggabungkan konsep nasionalisme ke dalam sendi-sendi agama. Dalam Islam sendiri ada KH Hasyim Azhari yang mampu menggabungkan nasionalisme dan Islam, yang mana konsep nasionalisme hanya mengambang pada waktu itu. Umat Islam dahulu hanya mengenal konsep khilafah dan kerajaan sedangkan konsep tentang nasionalisme belum jelas.<sup>32</sup>

Dari konsep nasionalisme, semua umat beragama harus saling menerima bahwa Indonesia punya seluruh umat beragama. Kesadaran mengenai nasionalisme harus ditumbuhkan kepada setiap anak bangsa. Membela tanah air harus juga menumbuhkan sifat toleransi sesama anak bangsa. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya raya dan makmur, dikarenakan kaya membuat bangsa eropa selalu menjajah, termasuk Jepang yang memanfaatkan Indonesia agar menjadi sekutunya. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka sangatlah kuat, kita bangsa yang merdeka hasil jerih payah para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya.

---

<sup>32</sup> Ibid, Hlm.35

Slogan mereka dikumandangkan di seluruh penjuru, kaum nasionalis dan agamis pun ikut berjuang dalam memerdekakan bangsa Indonesia.

Pada Piagam Jakarta, Indonesia meletakkan syariat Islam dihilangkan dalam sila pertama. Namun, bukan berarti Indonesia anti syariat Islam. Terbukti dalam UU banyak mengatur tentang syariat Islam yang berkenaan dengan muamalah dan ibadah. Hal ini adalah ijtihad, yang mana bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Pancasila mampu menyatukan berbagai macam agama dan ideologi sehingga kita tidak terjebak dalam perang sektarian. Adapun Pancasila sebagai ideologi final memerlukan keringat dan perjuangan besar dimulai dari perdebatan di konstituante antara faksi muslim dan nasionalis sehingga harus dicari jalan tengah agar ideologi Indonesia mampu menyatukan semua anak bangsa.<sup>33</sup>

Indonesia bisa merdeka bukan dari pemberian penjajah meskipun ketika Jepang datang ke Indonesia untuk mengusir belanda, mereka berjanji bahwa kemerdekaan Indonesia akan diberikan kepada rakyat setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda. Peristiwa Hiroshima dan Nagasaki yang akhirnya menjadikan Jepang harus mundur dari Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan penjajahan yang akhirnya membuat para tokoh untuk segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno menyampaikan pidatonya yang panjang dan tanpa teks di muka sidang BPUPKI, Soekarno terkenal sebagai orator ulung yang cara berfikirnya sangat artikulatif dan cara penyampaian ide-ide dan gagasannya sangat ekspresif serta memikat para pendengarnya.

---

<sup>33</sup> Ardiansyah, *Islam Berdialog dengan Zaman*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2018), Hlm.23



Dalam pidatonya yang menarik perhatian anggota BPUPKI Soekarno sebagai tokoh penting nasionalis netral agama mengusulkan lima dasar yang dinamakan Pancasila. Namun belumlah final sehingga dilanjutkan pembahasan lagi yang pada waktu itu para anggota BPUPKI terbagi dua kelompok dimana sebelumnya kelompok nasional telah menyampaikan pendapatnya. Salah satu tokoh Islam adalah Muhammad Natsir yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu cita-cita perjuangan Islam untuk menerapkan ajaran syariat Islam yang akhirnya menjadi benang merah.<sup>34</sup>

Untuk mendukung argumen ini faksi muslim seringkali menyebut nama-nama pejuang muslim seperti Sultan Habibullah dari Ternate, Sultan Hsanuddin dari Makassar, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, dan lainnya yang merupakan pejuang Islam di nusantara. Faksi nasionalis netral agama mengatakan Indonesia tidak pernah punya pengalaman berdirinya syariat Islam secara nasionalis, adapun syariat Islam hanya dilaksanakan di kerajaan Islam lokal. Meskipun melalui perdebatan alot, rumusan Pancasila tetap dijadikan pilihan yang selanjutnya dibentuk panitia Sembilan, dimana semuanya menyampaikan argumentasi yang berisikan dasar yang kita kenal dengan Piagam Jakarta.

Dari Piagam Jakarta umat Islam di Indonesia punya kemungkinan untuk menjalankan syariat Islam meskipun berideologi Pancasila namun akhirnya masih dilanjutkan lagi pembicaraan sebelum Indonesia merdeka dengan mengadakan sidang kedua sampai akhirnya Indonesia memproklamkan kemerdekaan.

---

<sup>34</sup> Ibid, Hlm.27

## **B. Masa sidang kedua BPUPKI**

BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10-17 Juli 1945 dengan agenda membahas rancangan undang-undang dasar. Dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Soekarno. Panitia membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Soepomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Soebardjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil disempurnakan keahsaannya oleh panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Soepomo.

Saat berlangsung sidang yang kedua, Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang undang-undang pada seluruh anggota sidang, yang berisikan tiga hal pokok, yakni pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Kemudian selanjutnya sidang menyusun kembali UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar sebelumnya, dan pada tanggal 17 Juli 1945 Laporan hasil kerja penyusunan Undang-undang Dasar dan laporan diterima oleh sidang pleno BPUPKI.<sup>35</sup>

Laporan rumusan Pancasila inilah yang menjadi keputusan resmi Sidang Kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada pekan kedua bulan Juli tahun 1945 yang dapat diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI, bahkan disepakati untuk dijadikan sebagai *Preambul* (Pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 atau

---

<sup>35</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta : GPU, 2011), Hlm. 5.

Pernyataan Kemerdekaan Indonesia. Rumusan tersebut sebagai keputusan resmi serta sebagai *Konsensus Nasional* yang disepakati oleh para *Founding Fathers* Negara Indonesia.

Rumusan Pancasila mengisyaratkan adanya wacana rumusan Pancasila yang dilontarkan Ir. Soekarno tersebut merupakan pendapat pribadi Soekarno yang diwacanakan melalui pidatonya dalam Sidang Pertama BPUPKI, dan belum menjadi keputusan sidang. Bahwa rumusan Pancasila I diputuskan melalui sidang Kedua BPUPKI sehingga menjadi putusan resmi sidang, serta menyatakan rumusan tersebut adalah rumusan yang pertama kali disepakati oleh para bapak para pendiri bangsa negara Indonesia. Setelah sidang memutuskan maka beberapa pekan setelah itu dilanjutkan proses untuk memproklamkan sebagai persiapan pengesahan yang ditandai dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang merupakan cikal bakal lahirnya kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan, sebagai gantinya pemerintah pendudukan Jepang membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 dan diketuai Soekarno dengan wakil Ketua Muhammad Hatta, langsung menggelar sidang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pernah dibuat dan ditetapkan BPUPKI sebelumnya.

Sebanyak 21 anggota PPKI yang terpilih tidak hanya terbatas pada wakil-wakil dari Jawa tetapi juga dari berbagai pulau, yaitu: 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, seorang dari Kalimantan, seorang dari Sunda Kecil (Nusa Tenggara), seorang dari Maluku dan seorang lagi dari golongan

penduduk Cina. Ir. Soekarno ditunjuk sebagai ketua PPKI dan Drs. Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketuanya, sedangkan Mr. Ahmad Subardjo ditunjuk sebagai penasehatnya. Kepada para anggota PPKI, Gunseikan Mayor Jenderal Yamamoto menegaskan bahwa para anggota PPKI merupakan orang yang akan dipilih sendiri oleh Jenderal Besar Terauci yang saat itu sebagai penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara.

Dalam rangka pengangkatan itulah, Jenderal Besar Terauci memanggil tiga tokoh Pergerakan Nasional, yaitu Ir. Sukarno, Drs. Muhammad. Hatta dan Dr. Radjiman Wedyoningrat. Pada tanggal 9 Agustus 1945 mereka berangkat menuju markas besar Terauci di Dalat, Vietnam Selatan.<sup>36</sup> Dalam pertemuan di Dalat pada tanggal 12 Agustus 1945 Jenderal Besar Terauci menyampaikan kepada ketiga tokoh itu bahwa Pemerintah Kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Pelaksanaannya dapat dilakukan segera setelah persiapannya selesai oleh PPKI. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Ketika ketiga tokoh itu berangkat kembali menuju Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang telah di bom atom oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan Uni Soviet mengingkari janjinya dan menyatakan perang terhadap Jepang seraya melakukan penyerbuan ke Manchuria. Dengan demikian dapat diramalkan bahwa kekalahan Jepang akan segera terjadi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Hatta, *Sekitar Proklamasi*, (Djakarta : Tintamas, 1969), Hlm.18

<sup>37</sup> Ibid, Hlm.23

### **C. Peristiwa Sekitar Proklamasi**

Kepastian berita kekalahan Jepang terjawab ketika tanggal 15 Agustus 1945 dini hari, Sekutu mengumumkan bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Berita tersebut diterima melalui siaran radio di Jakarta oleh para pemuda seperti Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, Wikana, dan lainnya. Penyerahan Jepang kepada Sekutu menghadapkan para pemimpin Indonesia pada masalah yang cukup berat, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*) Jepang masih tetap berkuasa atas Indonesia meskipun telah menyerah, sementara pasukan sekutu yang akan menggantikan mereka belum datang. *Gunseikan* telah mendapat perintah-perintah khusus agar mempertahankan status quo sampai kedatangan pasukan Sekutu.

Adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan munculnya konflik antara golongan muda dan golongan tua mengenai masalah kemerdekaan Indonesia. Golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan segera dikumandangkan. Mereka itu antara lain Sukarni, B.M Diah, Yusuf Kunto, Wikana, Sayuti Melik, Adam Malik, dan Chaerul Saleh. Sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Muhammad. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Muhammad. Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr. Iwa Kusumasumantri. Segala hubungan dan janji kemerdekaan harus di putuskan. dan sebaliknya perlu mengadakan perundingan dengan Ir. Soekarno dan Muhammad

Hatta agar kelompok pemuda diikuti sertakan dalam menyatakan proklamasi.<sup>38</sup>

Para pemuda mengamankan Soekarno Hatta dan ke Rengas dengkok antara lain agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh Jepang, dan mendesak keduanya supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang sehingga diketahui hal ini merupakan usaha dan perjuangan keras bangsa Indonesia. Pada hari Kamis, 16 Agustus 1945 rombongan para Pemuda yang telah membawa Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta bergerak kearah timur, yaitu ke Rengasdengklok.<sup>39</sup>

Rengasdengklok adalah kota kecamatan yang terletak di sebelah utara Karawang. Daerah Rengasdengklok ini kebetulan sudah di kuasai oleh pasukan PETA di bawah pimpinan Shudanco Singgih. Oleh karena itu, keamanan di Rengasdengklok lebih terjamin. Kamis, 16 Agustus 1945, Rombongan Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta sampai di Rengasdengklok. Di Rengasdengklok Bung Karno dan Bung Hatta tetap belum bersedia menyatakan kemerdekaan Indonesia hari itu juga. Yusuf Kunto yang berperan sebagai penghubung kembali ke Jakarta untuk mengetahui perkembangan situasi.

Ternyata situasi di Jakarta sedang menghangat, pada tanggal 16 Agustus 1945 PPKI akan bersidang, tetapi Bung Karno dan Bung Hatta dan wakil ketua PPKI tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo berusaha mencari dan bertemu Yusuf Kunto. Ahmad Subarjo bersama Yusuf Kunto pergi ke Rengasdengklok untuk menjemput Ir.

---

<sup>38</sup> Nugroho Notokusanto, *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*. (Jakarta : Tinta Mas, 1976), hlm.47

<sup>39</sup> Ibid, Hlm. 50

Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta beserta rombongannya. Ahmad Subarjo mendesak para pemuda agar membantu Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, serta memberikan jaminan kepada para pemuda. Beliau menyatakan bahwa Proklamasi Kemerdekaan akan di laksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 kalau Bung Karno dan Bung Hatta dapat kembali pada saat itu juga. Ahmad Subardjo mengatakan, kalau sampai pukul 12.00 proklamasi itu belum juga terjadi, nyawanya akan menjadi jaminan. Akhirnya Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta.<sup>40</sup>

Malam hari pukul 23.00 wib tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongan tiba di Jakarta. Setelah mengantarkan Ibu Fatmawati dan Guntur, Bung Karno dan kawan-kawan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah Maeda ini mereka mengumpulkan anggota PPKI dan tokoh-tokoh pergerakan serta para pemuda. Sebelum mengadakan pertemuan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan muhammad Hatta sebelumnya pergi menemui pemimpin tentara Jepang, Mayor Jendral Nashimura untuk menyatakan pendapat dan sikapnya tentang Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Nashimura mengatakan tidak bertanggung jawab dan menyerahkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Mengetahui sikap pemimpin Jepang, mereka segera mengadakan pertemuan. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo kemudian masuk di sebuah ruangan (ruang makan keluarga maeda) yang di ikuti Sukarni, Sayuti Malik, dan B.M. Diah. Di ruang makan keluarga Maeda itulah, Ir.

---

<sup>40</sup> Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, ( Jakarta : Tinta Mas, 1970), Hlm.27

Soekarno, Drs. Muhammad. Hatta, dan Ahmad Soebarjo merumuskan teks Proklamasi. Perumusan itu di saksikan oleh Sukarni, Sayuti Melik, B.M. Diah. Setelah semuanya sepakat, konsep teks Proklamasi itu diserahkan kepada Sayuti Malik untuk di ketik. Teks Proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik inilah yang dikenal dengan teks proklamasi yang autentik (resmi).<sup>41</sup>

#### **D. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia**

Sejak pagi hari halaman rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur No.56 sudah sangat sibuk. Suwiryo selaku Wakil Wali Kota Jakarta tampak sibuk. Suhud, seorang anggota Barisan Pelopor ditugasi untuk mencari tiang bendera dan menyiapkan bendera Merah Putih untuk tiang bendera menggunakan sebatang bamboo sedangkan bendera Merah Putih diperoleh dari Ibu Fatmawati yang di jahit sendiri olehnya. Pukul 10.00 wib acara di mulai dan dibuka dengan pidato Ir. Soekarno sebagai penghantar. Selanjutnya, Ir. Soekarno membacakan teks proklamasi yang telah ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Muhammad Hatta.

Setelah pembacaan proklamasi, dilakukan pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran bendera Merah Putih ini dilakukan oleh seorang mantan komandan PETA, Latif Hendraningrat dibantu oleh S. Suhud. Tanpa di komando, bersamaan dengan naiknya bendera Merah Putih itu para hadirin mengumandangkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman.

Berita proklamasi disebarluaskan secara cepat oleh segala lapisan masyarakat di sekitar Jakarta, terutama oleh para pemuda. Teks proklamasi yang telah

---

<sup>41</sup> Ibid, Hlm.30



dirumuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 beberapa saat kemudian berhasil diselundupkan ke kantor pusat pemberitaan Jepang, Domei (sekarang Kantor Berita Antara).<sup>42</sup> Wartawan Kantor Berita Domei, Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio, Waidan B. Palenewen untuk segera diudarakan.

Pucuk pimpinan tentara Jepang di Jawa segera memerintahkan untuk meralat berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan agar tidak berdampak luas. pemancar radio disegel oleh Jepang dan para pegawainya dilarang masuk. Walaupun kantor Berita Domei disegel, namun para pemuda tidak kehilangan akal, mereka membuat pemancar baru dengan bantuan teknisi radio, seperti Sukarman, Sutanto Susiloharjo, dan Suhandar.

Alat pemancar radio yang diambil dari Kantor Berita Domei sebagian dibawa ke rumah Waidan B. Palenewen dan sebagian ke Menteng 31. Di Menteng 31 itulah para pemuda merakit pemancar radio baru dengan kode panggilan WK 1. Dari pemancar radio inilah, berita proklamasi terus disiarkan. Tokoh-tokoh Indonesia yang bekerja di stasiun radio milik Jepang dan berjasa menyebarkan berita proklamasi, antara lain Maladi, Yusuf Ronodipuro, Sakti Alamsyah, dan Suryodipuro. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar. Harian Soeara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi.

---

<sup>42</sup> Ibid, Hlm.45

## **E. Masa Sidang PPKI**

Pada hari pertama setelah diumumkan Proklamasi, Para pendiri bangsa kembali mengadakan sidang, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk membahas konstitusi Negara Indonesia yang acuannya dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Drs. Mohammad Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah pada kalimat "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*"<sup>43</sup> Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dengan disetujuinya perubahan itu maka sidang pertama PPKI hasil kerja BPUPKI dibahas kembali, pada pembahasannya terdapat usul perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta.

Usulan perubahan sila pertama yang semula berbunyi Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan Bab II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Semua usulan itu diterima peserta sidang, hal itu menunjukkan mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah disempurnakan oleh PPKI, disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. UUD itu kemudian dikenal sebagai UUD 1945.

---

<sup>43</sup> Safroedin Bahar, Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, (Jakarta : Sekretariat Negeri RI, 1995), Hlm.91

Konstitusi Negara Indonesia UUD 1945 diumumkan dalam berita Republik Indonesia tahun ke-2 No.7 Tahun 1946 pada halaman 45-48. Sistematika UUD 1945 itu terdiri atas hal sebagai berikut, yakni Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea, Pada Alenia ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar Negara yang tertulis seperti yang kita kenal sekarang ini. Rumusan dasar Negara Indonesia merdeka adalah Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melanjutkan sidang, anggota Panitia Sembilan yang merumuskan Piagam Jakarta, hanya 4 (empat) orang yang masuk dalam PPKI, yaitu: Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebardjo dan Wahid Hasyim. Keberadaan UUD 1945 diumumkan dalam berita Republik Indonesia tahun ke-2 No.7 Tahun 1946 pada halaman 45-48. Sistematika UUD 1945 itu terdiri atas hal sebagai berikut, yakni Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea, Pada Alenia ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar Negara yang tertulis seperti yang kita kenal sekarang ini. Rumusan dasar Negara Indonesia merdeka adalah Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 Muhammad Hatta menyampaikan empat usul dan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Kata "Mukaddimah" diganti dengan kata "Pembukaan".

2. Dalam Preambul UUD 1945, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Piagam Jakarta, anak kalimat: "berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk- pemeluknya" diubah menjadi "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
3. Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi : "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam" diubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli".
4. Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi : "Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Esa".<sup>44</sup>

Akhirnya, melalui Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 tersebut, yang berlangsung hanya beberapa jam, usul Muhammad Hatta diterima. Sehingga redaksi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi :

*"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan, kerana tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa membawa rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan*

---

<sup>44</sup> Nugroho Notokusanto, *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1981), Hlm. 36

*dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*<sup>45</sup>

Dengan memperhatikan isi kandungan Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 hasil Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, maka kita dapatkan Rumusan Pancasila dengan susunan redaksi dan sistematikanya sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan - perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pernyataan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945

---

<sup>45</sup> Ibid, Hlm.41

mengundang kemarahan pemerintah Belanda, karena selepas kekalahan Jepang oleh tentara sekutu, maka pemerintah Belanda merasa paling berhak mengambil alih Indonesia dari tangan pemerintah Jepang. Untuk tujuan mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia, Belanda melancarkan dua kali tindakan penyerangan terhadap Republik Indonesia, *pertama* pada 21 Juli 1947, dan *kedua* pada 18 Desember 1948.<sup>46</sup> Melalui tindakan agresi I Belanda menduduki Jakarta, Bandung dan Jawa Barat, begitu juga Semarang, Surabaya dan Madura. Mereka juga menguasai Medan, Palembang dan Padang. Atas himbuan *United Nation* (Perhimpunan Bangsa-Bangsa), tanggal 4 Agustus 1947 dilakukan gencatan senjata antara Belanda– republik Indonesia.

Selanjutnya, pada Januari 1948 di gelar perundingan Belanda–republik Indonesia diatas kapal USS Renville milik Amerika Serikat, yang melahirkan kesepakatan Renville. Selama penyerangan pemerintah Belanda secara berturut-turut membentuk negara-negara federal di wilayah-wilayah yang diduduki. Pada Juli 1948, Belanda telah membentuk pemerintahan sementara untuk Indonesia yang berbentuk federal, dengan menunjuk *Van Mook* sebagai Presiden. Belanda membentuk *Bijeenkomst voor Federale Overleg* (BFO) yakni Majelis Permusyawaratan Federal. Negara federal yang dibentuk oleh pemerintah Belanda mencapai 5 (lima) negara, di antaranya yaitu :

1. Negara Sumatera Timur dibentuk pada Desember 1947
2. Negara Madura dibentuk pada Februari 1948

---

<sup>46</sup> Suyitno, *Konsep Negara*, ( Jakarta, : Bumi Aksara, 2001), Hlm.25

3. Negara Jawa Barat (Pasundan) dibentuk pada Februari 1948
4. Negara Sumatera Selatan dibentuk pada September 1948
5. Negara Jawa Timur dibentuk pada November 1948.

Ketika itu keadaan Republik Indonesia dalam keadaan kacau, karena bukan hanya menghadapi tekanan-tekanan pihak Belanda, namun ditambah dengan pemberontak PKI (Partai Komunis Indonesia) di Surakarta dan Madiun pada September 1948. Belanda pun memanfaatkan kekacauan yang terjadi di Republik Indonesia dengan melancarkan penyerangan pada 18 Desember 1948 untuk merebut Yogyakarta dan dalam waktu sehari. Pada tanggal 19 Desember 1948 Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, banyak para pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap saat itu antara lain: Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan Agus Salim.<sup>47</sup>

Hal ini menyebabkan kekosongan pemerintahan, Presiden beserta hampir semua anggota kabinet Republik Indonesia ditangkap oleh Belanda, maka dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Presidennya. Tekanan Belanda yang amat kuat berhasil memaksa Republik Indonesia maju ke meja perundingan. Melalui statemen Room-Van Royen pada tanggal 7 Mei 1949, Belanda mengembalikan Soekarno dan Muhammad Hatta dan kawan-kawan ke Yogyakarta dari pembuangannya di Bangka. Selanjutnya, Republik Indonesia (RI) dan *Bijeenkomst voor Federale*

---

<sup>47</sup> Ibid, Hlm. 29

*Overleg* (BFO) ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di *Den Haag* dari 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949.

Selanjutnya pada 14 Desember 1949, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah RI melegalisasi Piagam Persetujuan tersebut sebagai Konstitusi. Dalam Mukaddimah Konstitusi RIS termaktub sebagai berikut : *"Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh tahun lamanya bersatu padu dalam perjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati teguh berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa yang merdeka-berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik-Federasi, berdasarkan pengakuan: Ketuhanan Yang Maha Esa Perikemanusiaan Kebangsaan Kerakyatan, dan Keadilan Sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna.*<sup>48</sup>

Dengan memperhatikan isi kandungan Pembukaan Konstitusi RIS pada tanggal 29 Oktober 1949 di atas, maka kita dapatkan Rumusan Pancasila dengan susunan redaksi dan sistematikanya sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Perikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan

---

<sup>48</sup> Ibid, Hlm.40



## 5. Keadilan Sosial

Inilah rumusan dasar negara yang jika dibandingkan dengan rumusan-rumusan sebelumnya, maka telah terjadi banyak perubahan redaksional. Republik Indonesia Serikat (RIS) yang didirikan pada 29 Oktober 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, ternyata tidak bertahan lama, bahkan kurang dari setahun. Pada 3 April 1950, Muhammad Natsir dan kawan-kawan di Dewan Perwakilan Rakyat Federal tampil mengajukan *Usul* yang kemudian dikenal dengan *Usul Integral Natsir*.<sup>49</sup> Pada hari yang sama Usul tersebut dikabulkan oleh DPR Federal dan selanjutnya, pada tanggal 19 Mei 1950 digelar Konferensi RIS – RI yang menyepakati untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada tanggal 20 Juli 1950, disetujui Undang-Undang Dasar Sementara NKRI 1950 yang baru disahkan pada 14 Agustus 1950. Bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai berikut : *"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan, kerana tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa membawa rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik-*

---

<sup>49</sup> Ibid, Hlm. 49

*Federasi, berdasarkan pengakuan: Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna”*

Sesuai amanat UUDS 1950 bab V pasal 134 yang menyatakan :

*”Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah secepat-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”*

Pada tanggal 15 Desember 1955 untuk pertama kalinya digelar Pemilihan Umum untuk membentuk Majelis Konstituante. Selanjutnya Majelis Konstituante yang terbentuk melakukan sidang-sidang guna membuat Undang-Undang Dasar. Dalam proses perumusan Pancasila kali ini, sikap majelis konstituante terbagi dua :

#### 1. Paksi Islam

Paksi ini terdiri dari Masyumi, Nahdhotul Ulama, PSII, Parti, Akui, Gerpis dan mereka menginginkan rumusan Pancasila sesuai dengan rumusan yang tertulis dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

#### 2. Paksi Sekuler

Paksi ini terdiri dari PNI, PKI, Parkindo, Partai Katolik, PSI, IPKI dan beberapa partai kecil. Mereka menginginkan rumusan Pancasila sesuai dengan rumusan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid, Hlm. 63

Namun demikian, suara masing-masing kelompok dalam Majelis Konstituante tidak mencapai kuorum, yaitu 2/3 (dua Pertiga) jumlah suara yang hadir, sehingga sidang mengalami *deadlock*. Kenyataan itulah yang mendorong Presiden Soekarno, selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya sebagai berikut :

*Kami Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang*

*“Dengan ini menyatakan dengan khidmad : Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara ;*

*Bahwa berhubung dengan pernyataan sebahagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang, Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya;*

*Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangai pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur ;*

*Bahwa dengan dukungan bahagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu- satunya jalan untuk menyelamatkan negara proklamasi; Bahwa kami berkeyakinan bahawa Piagam*

*Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut, maka atas dasar- dasar tersebut di atas Kami Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang Menetapkan pembubaran Konstituante Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang- Undang Dasar Sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Partimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.*

*Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Juli 1959*

*Atas nama rakyat Indonesia*

*Kami Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang*

**SOEKARNO**

Terlihat jelas, bahawa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan satu usaha Presiden Soekarno untuk menengahi Partikaian antara kelompok Islam dan kelompok Sekuler. Kandungan Dekrit tersebut tidak hanya menetapkan Rumusan Pancasila sesuai dengan Rumusan Pancasila yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, namun juga mesti dijiwai dengan Rumusan

Pancasila yang tertulis dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945.<sup>51</sup>

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah memperhatikan dengan cermat dan teliti tentang perumusan dasar negara dari sidang pertama sampai akhirnya. Pernyataan Mr. Muhammad Yamin sebagai salah seorang penandatangan Piagam Jakarta dari kelompok kabangsaan menyimpulkan bahwa ajaran filsafat Pancasila seperti berturut-turut diuraikan dalam kata pembuka Konstitusi Republik Indonesia 1945, dalam mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, dan Konstitusi Republik Indonesia 1950, adalah seluruhnya berasal dari Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 yang ditandatangani oleh Sembilan orang Indonesia terkemuka, sebagai suatu pembangunan tinjauan hidup bangsa Indonesia.<sup>52</sup> Hasil yang sebelumnya tersebut telah disepakati yang tertuang dalam lembaran Negara No.75 tahun 1959 dan kembali di tegaskan berdasarkan Intruksi Presiden No.12 tahun 1968, Yakni :

---

<sup>51</sup> Muhammad Yamin, *Pembukaan Undang-undang Dasar 1945*, ( Jakarta : Prapanca, 1960 ), Hlm.366

<sup>52</sup> Ibid, Hlm.367

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Berdasarkan hal diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa seiring dengan sejarah perumusan dasar negara yakni Pancasila yang mengalami pasang surut bahkan sempat terjadi pergantian dasar negara maka rumusan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana isi dari Piagam Jakarta sudah sesuai dengan isi dekrit 5 Juli 1959 yang sampai sampai saat ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

## **BAB IV**

### **PEMIKIRAN MUHAMMAD YAMIN TENTANG DASAR NEGARA**

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang proses perumusan dasar negara yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa dimana mereka memiliki ide dan gagasan yang telah disampaikan pada saat proses persidangan resmi dan tidak resmi Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebelum dan sesudah diumumkankannya proklamasi. Ide-ide pokok dasar negara yang disampaikan pada saat pidato sidang BPUPKI pertama yaitu sebagai berikut: Muhammad Yamin adalah perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.

Ide-ide pokok dasar negara yang diutarakan oleh Soepomo adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.<sup>53</sup> Menurut Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokratis, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Para *founding Fathers* menyampaikan gagasan dan pemikirannya mengenai dasar pembentukan negara yang akan menjadi landasan pelaksanaan kehidupan bernegara yang salah satunya disampaikan oleh Muhammad Yamin. Pemikirannya mengenai “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”. mengusulkan dasar Negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai

---

<sup>53</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, ( Jakarta : Yayasan Prapanca, 1959), Hlm.265

berikut: Peri kebangsaan; Peri kemanusiaan; Peri ketuhanan; Peri kerakyatan; Kesejahteraan rakyat.

## **A. Pokok Pikiran Muhammad Yamin tentang dasar negara**

### **1. Peri ketuhanan**

Menurut piagam Jakarta maka bunyi kalimat penjelasan Pancasila, maka ke-Tuhanan sendiri bukanlah dasar melainkan pengakuan kepada ke-Tuhananlah yang menjadi dasar negara, negaralah yang memakai dasar itu, dengan ke-Tuhanan lah yang dimaksud yaitu ketuhanan yang maha Esa, jadi terang yang dimaksud yaitu Tuhan yang Esa-Tunggal, dengan penjelasan bahwa negara Kesatuan republik Indonesia itu berdasarkan Monotheisme (ketuhanan yang satu) dan bukan polytheisme (ketuhanan yang banyak) dan bukan berdasarkan atheisme (tidak bertuhan).<sup>54</sup>

Tidaklah ditegaskan dalam ajaran Pancasila itu bagaimana perhubungan antara penagakuan negara kepada tuhan dengan pengakuan masing-masing warga negara ketuhanan atau tidak bertuhan, jika diartikan lebih tegas lagi maka ajaran Pancasila terhadap hal itu adalah semata-mata urusan negara, dan tentang itu maka masing-masing warga negara mempunyai kebebasan luas dan tidak terbatas. Selama susunan negara masih terpisah daripada susunan masyarakat, maka pendapat yang tersebut boleh dijadikan dasar.

---

<sup>54</sup> Muhammad Yamin, *Tinjauan Pantjasila Terhadap Revolusi Nasional*, (Jakarta : Arsip, 1959), Hlm.11



Indonesia sebagai negara yang berdasarkan ke-Tuhanan tidak menjadikan Indonesia sebagai negara berdasarkan *thocratie*, karena dalam konstitusi ditegaskan bahwa segala kekuasaan bersumber kepada kedaulatan rakyat dan tidaklah segala-galanya urusan pemerintahan itu dengan langsung menjadi bayangan atau ciptaan Tuhan. Dengan tegas ajaran pancasila bagian peri ke-Tuhanan ini diulang dengan menyebut negara berdasar atas ke-Tuhanan yang maha Esa. Dengan dasar peri ke-Tuhanan membuktikan dengan tegas bahwa Republik Indonesia percaya kepada rohani yang mengatasi segala macam penyusunan dalam susunan politik.<sup>55</sup>

## 2. Peri kemanusiaan

Dalam hal ini mula-mula Muhammad Yamin tidak langsung membicarakan kemanusiaan, dimulai dengan suatu rancangan yang menyatakan adanya tujuan kemerdekaan itu sama artinya dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Kedaulatan ini menuju kedalam dan keluar yakni dengan memberi pengawasaan luhur kepada putera negara dengan hak milik dan harta bendanya serta mengatur hubungan dengan negara-negara lain, memeluk keanggotaan keluarga bangsa-bangsa.

Muhammad Yamin menghendaki status internasional yang sempurna bagi negara Indonesia. Menolak status dominion, proktetorat atau mandate dan tidak akan memakai kesempatan yang diberikan oleh *atlantic charter* untuk memilih bentuk pemerintahan yang disukai pendapat ini hanya sekaedar taktik dalam menghadapi Jepang saat itu. Mei 1945 tentara Jepang masih berkuasa di Indonesia, oleh karena

---

<sup>55</sup> Ibid, Hlm.17

itu secara diplomatis mengatakan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia merdeka adalah berdasarkan perikemanusiaan yang universal berisi humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa.<sup>56</sup>

Dasar yang menjadi pokok pikiran kelahiran suatu tinjauan hidup bahwa manusia seluruh dunia ini ialah sama-sama makhluk Tuhan, sikap ini mengatasi sikap kebangsaan yang sempit dan mengatasi segala perasaan yang terikat kepada perwatakan bangsa dan negara. Dasar perikemanusiaan adalah dasar universalisme dan macam humanisme, dasar ini tidak tinggal hanya pada rasa menghubungkan diri dengan bangsa-bangsa lain melainkan pula adalah asas internasionalisme yang menghubungkan para anggota masyarakat segala negara sedunia serta membuang segala perasaan lebih tinggi dari bangsa lain dan menguatkan sikap rohani dan tindakan bahwa segala bangsa itu sama tinggi dan sama rendahnya.

Pada pelaksanaannya maka perikemanusiaan itu sangat berlawanan dan menentang kolonialisme yang hendak menjajah bangsa lain. Internasionalisme yang mengakui kemerdekaan segala bangsa ini sungguh mendorong orang supaya berjaga-jaga dan berusaha menjatuhkan kolonialisme dan imperialisme, seperti yang terdapat dalam mukadimah “ maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Sesudah mendahulukan dasar umum ini yang dengan langsung berhubungan dengan kehidupan di jagad besar dalam alam dan di permukaan bumi antara segala

---

<sup>56</sup> Ibid, Hlm. 23

bangsa dalam pertaliannya sesama mereka atau dalam pertaliannya dengan tenaga luhur dalam kehidupan bangsa.

### 3. Peri Kebangsaan

Negara baru yang akan dibangun adalah suatu negara kebangsaan Indonesia, yang bersumber pada nasionalisme atau dasar kebangsaan yang mengikat bangsa kita seketurunan dan sesama kemauan yang menjadi bagian dari nasionalisme baru.<sup>57</sup>

Nasionalisme ini berisi paham hendak mempersatukan rakyat dalam ikatan sejarah yang melindungi bangsa. Nasionalisme baru dasarnya memang berlainan dan berbeda dari usaha rakyat Indonesia dahulu waktu mendirikan negara Syailendra-Sriwijaya (600-400) sebagai negara Indonesia I dan juga berbeda dengan dasar-dasar waktu mendirikan kerajaan Majapahit (1293-1525) sebagai negara Indonesia I.

Negara Syailendra-Sriwijaya didasarkan pada falsafah kedatuan yang cocok dengan kepercayaan purbakala dan negara Majapahit didasarkan pada falsafah keprabuan, sedangkan negara Indonesia III, yaitu Republik Indonesia berdasarkan paham kebangsaan dan ber-Ketuhanan.<sup>58</sup> Muhammad Yamin mengemukakan bahwa tentang paham dan falsafah kedatuan dan keprabuan tentu saja tidak dapat dilanjutkan pada masa kini dikarenakan :

1. tradisi kenegaraan antara negara Sriwijaya-Majapahit dengan Republik Indonesia sekarang tidak bersambung tetapi putus
2. Aspirasi sekarang berlainan dengan zaman dahulu

---

<sup>57</sup> Sutrisno Kutoyo, *Prof.H.Muhammad Yamin, SH*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), Hlm.73

<sup>58</sup> *Ibid*, Hlm. 75

### 3. Agama dan wawasan pikiran sudah berlainan dan mengalami perbedaan.

Walaupun demikian tidak berarti bangsa Indonesia melepaskan diri dari sejarah masa lampau dan Muhammad Yamin memahami bahwa bangsa Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia, dasar negara Indonesia hendaknya bersesuaian dengan dasar-dasar seperti adat, agama, dan pengetahuan yang tidak meniru dari bangsa lain serta menghendaki suatu dasar negara yang sesuai dengan kemauan jiwa dan keinginan cita-cita rakyat Indonesia sendiri.

Dasar kebangsaan diakui langsung dengan menyebutkan istilah dengan berbagai sebutan seperti kata negara Indonesia yang merdeka dan bersatu, penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam Undang-undang kemudian dinyatakan bahwa satu dari lima dasar yaitu persatuan Indonesia. Nasionalisme Indonesia yang dinyatakan pada permulaan konstitusi ialah nasionalisme persatuan (unitarisme) dan bukanlah nasionalisme federalisme serta menghendaki kemerdekaan yang penuh bagi seluruh wilayah dan rakyat Indonesia. Nasionalisme itu meliputi segala aliran, paham, partai, dan golongan.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal ini maka keadaan negara sejak pembentukan dan proklamasi merupakan negara nasional yang baru lahir setelah kemerdekaan dan bersama-sama mendapat kemenangan, republik Indonesia adalah suatu negara kebangsaan dan kerakyatan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bersama-sama dan menjadi bagian dari dunia internasional.

---

<sup>59</sup> Ibid, Hlm.77

#### 4. Peri kerakyatan

##### a. Permusyawaratan

Pertama-tama Muhammad Yamin mengambil sumber dari kitab suci Al-qur'an surat Assyura ayat 38 yakni "segala urusan mereka dimusyawarahkan". Pada zaman rasulullah SAW dan pada masa khalifah, permusyawaratan dijalankan sebaik-baiknya. Kebaikan sistem musyawarah adalah :

1. Memberi kesempatan pada orang yang berkepentingan untuk mengemukakan dan mendengarkan pendapat.
2. Membesarkan tanggung jawab warga Negara.
3. Menimbulkan kewajiban yang mengikat.<sup>60</sup>

Musyawarah memajukan umat berdasarkan beberapa hal pula, yaitu :

1. Dengan musyawarah manusia memperluas perjuangan dan fikirannya menjadi terbuka.
2. Dengan musyawarah, pimpinan dan urusan negaratidak dipikul oleh seorang manusia, atau fikiran yang berputar dari sebuah kepala saja melainkan dipangku oleh golongan-golongan lain, Negara tidak terpusat pada seorang insan tetapi pada orang banyak yang bersama-sama membentuk Negara.
3. Permusyawaratan menghilangkan kehilafan pendirian dan kesesatan.

Perintah agama yang mewajibkan untuk bermusyawarah untuk urusan umum, hendaknya menjadi dasar masyarakat Indonesia. Negara yang tidak berdasarkan permusyawaratan adalah Negara yang menjauhkan ketuhanan dan melanggar

---

<sup>60</sup> Ibid, Hlm.79

peradaban Indonesia. Dasar musyawarah di ambil dari sifat-sifat pada masa prasejarah yang menghilangkan dasar perseorangan (individualistis) dan menimbulkan hidup bersama dalam masyarakat. Jadi Menurut Muhammad Yamin, tata Negara Indonesia yang berdasar mufakat-musyawarah menjadi kuat karena dasar-dasarnya tersimpan dalam ketuhanan dan adat tradisi bangsa.

#### b. Perwakilan

Semua susunan hukum adat di seluruh tanah air memiliki banyak kesamaan, sifat utama dari susunan masyarakat ialah adanya sistem perwakilan, tokoh-tokoh yang terpilih dalam perwakilan mengatur kekuasaan di masing-masing wilayah. Menurut Muhammad Yamin, bahwa feodalisme merupakan masalah yang ada dalam masyarakat oleh karena itu mesti ada dasar yang harus disesuaikan dengan peradaban yang berasal dan digali dari peradaban Indonesia sendiri dan bukan dari luar.

#### c. Kebijakan

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah rasionalisme, yang tidak terlepas dari dua hal yakni *pertama* Perintah Allah yang terdapat dalam Alqur'an dan yang *kedua* harus sejajar dengan garis besar adat tradisi masyarakat Indonesia. Hikmah kebijakan ialah rasionalisme yang sehat karena telah terlepas dari keadaan anarki, liberalisme dan semangat penjajahan.

Mukadimah telah menerangkan dengan nyata bahwa satu dari prinsip dasar negara adalah kerakyatan atau demokrasi yang merupakan dasar pembentukan pemerintah dan masyarakat yang didalamnya terdapat kekuasaan pemerintah yang secara sah mengatur masyarakat bukan hanya satu golongan namun semua golongan.

Konstitusi juga menyebutkan kerakyatan secara umum meliputi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Batasan demokrasi dilaksanakan oleh negara dengan jaminan menurut aturan peradaban, kebiasaan, dan agama. Sejak beribu-ribu tahun peradaban Indonesia, maka segala putusan yang mengenai negara dan masyarakat dihasilkan dengan cara berunding antara anggota yang berkepentingan. Kata mufakat ialah cara memerintah menurut watak dan peradaban bangsa. Perundingan itu menjamin bahwa pemerintahan selalu berjalan menurut keinginan banyak orang yang mengeluarkan pendapat serta perundingan itu sejajar dengan kelahiran adat asli yang menghendaki mufakat sesuai aturan agama Islam yang memerintahkan musyawarah.<sup>61</sup>

Permusyawaratan yang mencari kata mufakat sehingga mendapat kebulatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan perantara perwakilan dalam susunan negara. Atas dasar kerakyatan inilah akan dibentuk menurut konstitusi 1945 sehingga keputusan yang diambil menurut rancangan hendak mewujudkan demokrasi yang benar. Dasar demokrasi dilaksanakan dalam susunan negara dengan mengakui persamaan manusiandan warga sebagai hak dalam susunan masyarakat untuk kesejahteraan dan perekonomian.

## 5. Kesejahteraan Rakyat

Pendapat Muhammad Yamin tentang Kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial dihubungkan dengan adanya pembentukan negara yang berkaitan dengan

---

<sup>61</sup> Muhammad Yamin, *Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945*, (Jakarta : Prapanca, 1960), Hlm.80

kehidupan ekonomi sosial dengan melaksanakan kesejahteraan umum bagi segala penduduk dan warga negara. Dasar ini disebutkan dalam Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945 sebanyak dua kali yakni pertama sebagai dasar tujuan negara yang bernama ketertiban dunia dan kedua sebagai suatu wujud Pancasila.

Demokrasi politik memberi hak yang sama kepada semua warga dalam susunan negara untuk membela tanah air serta pelaksanaan demokrasi ekonomi sebagai tuntutan yang hampir sejajar dengan keadilan sosial menghendaki persamaan kesejahteraan dan menghilangkan perbedaan besar antara kemakmuran warga negara atau golongan rakyat.<sup>62</sup>

Keadilan sosial memberi perimbangan kepada kedudukan perseorangan dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia telah lama tidak menerima cara hidup yang mementingkan kepentingan perseorangan, sehingga perimbangan kesejahteraan dalam masyarakat terganggu. Ajaran Pancasila dijalankan dalam seluruh batang tubuh konstitusi dan sebagai pedoman bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Selanjutnya Muhammad Yamin mengemukakan hal mengenai penduduk, supaya segera setelah Indonesia merdeka pembagian penduduk sudah dipastikan, berikut tentang hidup perekonomiannya dan hak atas tanah, supaya jelas apakah golongan peranakan arab dan tionghoa menjadi putera Indonesia atau tetap sebagai orang asing. Menjelang akhir pidatonya Muhammad Yamin mengatakan bahwa Negara Indonesia merdeka merupakan Negara baru, anggota keluarga baru di atas

---

<sup>62</sup> Ibid, Hlm.81



dunia, tetapi sebenarnya bangsa Indonesia sudah berumur tua dengan peradaban luhur dan rakyatnya beragama ketuhanan, kesejahteraan rakyat itu ringkasnya ialah keadilan masyarakat atau keadilan sosial.

### **B. Dasar dan Tujuan Negara menurut Muhammad Yamin**

Dasar dan tujuan revolusi Indonesia ditetapkan dalam piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, yang berisi garis-garis pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka berdaulat dan berisi pendirian perlawanan terhadap imperealisme. Piagam Jakarta menjadi mukadimah atau preambuli konstitusi Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945, disusun menurut filosofi politik yang ditentukan dalam piagam persetujuan tersebut.

Piagam Jakarta berisi pula kalimat Proklamasi dan isi konstitusi Indonesia. Seluruh piagam Jakarta menjadi kata-kata pembuka UUD Republik Indonesia, perkataan “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” disalin ke dalam mukadimah konstitusi yang akhirnya tidak ditulis karena pemeluk agama Islam sudah seharusnya berkewajiban menjalankan ajaran Islam, kemungkinan akan ragu terhadap kewajiban itu tidak boleh ada pada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.<sup>63</sup>

Kewajiban umat perseorangan terhadap agamanya tidak boleh dibimbangkan oleh negara. Ajaran Pancasila tetap tertulis menjadi dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1945 sehingga disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik

---

<sup>63</sup> Muhammad Yamin, *Sistem Falsafah Pancasila*, (Jakarta : Djambatan, 1952), Hlm.110

Kesatuan berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang berdaulat.<sup>64</sup>

Seperti dijelaskan sebelumnya dalam piagam Jakarta konstitusi disusun berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Konstitusi ialah susunan kemerdekaan dan merupakan sumber yang melahirkan Republik Indonesia dan kekuasaan tertinggi yang dinamai kedaulatan rakyat, sehingga antara kedaulatan rakyat dengan konstitusi adalah dapat dibandingkan dengan perhubungan antara rohani dengan jasmani, perhubungan itu dilaksanakan oleh kemerdekaan rakyat yang telah dicapai dengan perjuangan.

Kedaulatan rakyat berdasarkan ajaran sila-sila Pancasila adalah filosofi Negara yang besar pengaruhnya dan saling berkaitan dengan politik, pendidikan, dan pengajaran, oleh karena itu harus ditaati dan dipatuhi oleh seluruh penganut dalam Republik Indonesia, yang meliputi :

1. Penganut agama dalam Republik Indonesia ialah seorang religius karena dasar sila pertama berisi pengakuan ke-Tuhanan yang maha Esa.
2. Penganut sosialisme dalam Republik Indonesia ialah religius sosialis karena dasar sila pertama berisi pengakuan adanya Tuhan yang maha Esa.
3. Penganut nasionalisme dalam Republik Indonesia ialah seorang religius nasionalis karena dasar sila pertama berisi pengakuan ke-Tuhanan yang maha Esa.

---

<sup>64</sup> Ibid, Hlm.107

### **C. Dasar Negara dan Konstitusi**

Dalam pembentukan dasar negara, setelah sidang yang dilakukan para *founding father*, tanggal 22 Juni 1945 mempunyai makna yang penting untuk kesadaran ke-Islaman di Indonesia, yang pertama menumbuhkan semangat untuk lebih memperdalam pengetahuan tentang sejarah pertumbuhan umat Islam di Indonesia dan yang kedua sebagai pengingat kembali pemikiran para perumus dasar negara dan perumus konstitusi dengan merenungkan rumus yang bagaimana yang sebaik-baiknya dipergunakan untuk landasan hidup bernegara rakyat Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam.<sup>65</sup>

Berbicara tentang kesadaran berkonstitusi, maka pada umumnya kesadaran itu belumlah cukup mendalam, pengetahuan tentang isinya masih sangat dangkal, pembahasannya masih kurang sungguh-sungguh. Oleh karena itulah disini penulis berusaha untuk melihat perbandingan teks rumusan Pancasila, Piagam Jakarta, dan Pembukaan UUD 1945 dalam konteks sejarah yang diawali dengan pertemuan rapat antara para golongan Islam dan nasionalis dimana sebelum rapat di mulai atas permintaan Soekarno dan Muhammad hatta lebih dulu berunding dengan Ki Bagus Hadikusumo dan Muhammad Hasan.

Dalam pertemuan tersebut memberikan penjelasan dan meyakinkan KI Bagus supaya dapat menyetujui istilah Ketuhanan yang maha Esa dalam pembukaan UUD RI dan dalam pasal 29 ayat 1 dengan maksud supaya tercapai persatuan seluruh bangsa Indonesia, baik umat Islam maupun non Islam, meskipun sebenarnya KI

---

<sup>65</sup> Dwi Purwoko, dkk, *Nasionalis Islam*, (Jakarta : A. Kreasi, 2001), Hlm.18

Bagus Hadikusumo mempertahankan perkataan “Islam” dan sebagainya dalam perundingan tersebut beliau dapat menyetujui istilah Ketuhanan yang maha Esa setelah diberi penjelasan oleh Muhammad Hasan, maksud pembicaraan ini supaya hal tersebut tidak dibicarakan lagi dalam rapat lengkap pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang akan banyak memakan waktu.

Manifestasi sikap konstitusi terjadi dalam bentuk konfrotasi rumusan Pancasila yakni Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945 yang pada rapat konstitusi yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959, Piagam Jakarta lahir dalam bentuk amandemen dimana ada usul pemerintah dapat menerima konstitusi tanpa perubahan sedikitpun. Untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang dasarnya akan tetapi harus menyelidiki bagaimana suasana kebatinan yang berlangsung dalam proses konstitusi.<sup>66</sup>

Nasionalisme Indonesia yang dalam perkembangannya mencapai titik puncak setelah perang dunia II yaitu dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia ini artinya bahwa pembentukan nasional Indonesia berlangsung melalui proses sejarah yang panjang . Indonesia dan negara-negara lain di Asia mengalami penjajahan dan secara serempak membangkitkan nasionalismenya sendiri-sendiri sehingga menciptakan negara merdeka. Ada tiga macam teori tentang pembentukan *nation*, *pertama*, yaitu teori kebudayaan (*culture*) yang menyebut suatu bangsa itu adalah sekelompok manusia dengan persamaan kebudayaan. *kedua*, teori negara (*staat*) yang

---

<sup>66</sup> Darji Darmodiharjo, dkk, *Santiaji Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), Hlm.126

menentukan terbentuknya suatu negara lebih dahulu adalah penduduk yang ada didalamnya disebut bangsa dan teori *ketiga* adalah karena kemauan (*wills*) yang mengatakan bahwa syarat mutlak yaitu adanya kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa tanpa memandang perbedaan kebudayaan, suku, dan agama.<sup>67</sup>

Nasionalisme adalah suatu ideologi yang memandang seluruh rakyat yang menginginkan membangun masa depannya bersama sebagai suatu bangsa. Bangsa adalah suatu nyawa, suatu asas akal yang terjadi dari dua hal, pertama yakni, rakyat itu dulunya menjalani satu riwayat, kedua yaitu, rakyat itu harus mempunyai kemauan, keinginan hidup menjadi satu, bukannya jenis ras, bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan kebutuhan, bukan pula batas-batas negeri yang menjadi bangsa itu. Jadi nasionalisme ialah suatu itikad, suatu keinsyafan rakyat bahwa rakyat dan golongan itu, satu bangsa.

Untuk mewujudkan adanya nasionalisme Indonesia maka persatuan yang sangat menentukan, karena persatuan akan membawa kearah kemerdekaan Indonesia. tentang persatuan ini dinyatakan bahwa persatuanlah yang kelak akan membawa kita ke arah terkabulnya impian kita, Indonesia merdeka! Entah bagaimana terciptanya persatuan itu, entah pula bahaimana rupanya persatuan itu akan tetapi tetaplah bahwa kapal membawa kita ke Indonesia merdeka ialah kapal persatuan adanya. Sehingga untuk mencapai persatuan itu maka harus diusahakan adanya persatuan antara golongan nasionalis dan Islam.

---

<sup>67</sup> Rima Kainama, Keaneka-an dalam Simpul Persatuan, (Jakarta : Etika Sosial, 2013), Hlm,117

#### **D. Undang-Undang Dasar Negara**

Menurut Yamin, prinsip pertama yang menggarisbawahi dasar suatu filsafat Indonesia merdeka adalah nasionalisme. Nasionalisme yang mengikat kita dalam satu kehidupan bersama dalam satu keluarga dan seketurunan. Untuk itulah negara yang akan didirikan nantinya harus merupakan persatuan yang menyatukan ikatan sejarah yang melindungi segenap rakyat Indonesia yang berada didalamnya dan yang berbeda dengan sistem yang terjadi pada masa Majapahit dan Sriwijaya.<sup>68</sup>

Pandangan ini menjadi dasar bagi pengembangan peri kebangsaan dan ketuhanan yang merupakan dasar negara Indonesia serta memberi peringatan bahwa dalam menyusun negara haruslah disusun menurut watak dan peradaban bangsa Indonesia dan tidak meniru konstitusi negara lain. Hukum dasar dari negara luar hanyalah dapat digunakan sebagai cermin saja, karena dalam pembentukan negara ini yang hendak dicapai adalah kemauan jiwa dan cita-cita rakyat seluruhnya.

Kehendak untuk merdeka dan berdaulat serta bebas dalam berhubungan dengan negara lain di dunia menjadi dasar yamin dalam menuangkan pemikirannya tentang perikemanusiaan. Sehingga dengan sendirinya dasar kemerdekaan itu akan terus berupa kedaulatan menuju ke dalam dan kedaulatan menuju keluar dan hal ini berhubungan dengan negara lain. Kemerdekaan mengandung makna memberi perlindungan tinggi dan memberi pengawasan luhur kepada warga negara untuk menggunakan hak milik dan harta bendanya, yang dapat menjadi dasar kedaulatan negara.

---

<sup>68</sup> Sutrisno Kutoyo, *Muhammad Yamin*, ( Jakarta : Depdikbud,1985), Hlm.112

Peri kemanusiaan yang akan dibangun dalam negara Indonesia adalah negara merdeka, yang universal berisi humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan universalisme yang berperadaban luhur dan peradaban itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dilanjutkan dengan peri kerakyatan yang meliputi musyawarah yang membawa tindakan yang memberikan kesempatan kepada orang yang berkepentingan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan menimbulkan kewajiban yang tidak mengikat namun berusaha menyesuaikan dengan keadaan negara, Mengingat begitu banyaknya dan luasnya negara Indonesia, maka untuk dapat menjalankan sistem musyawarah yang efektif perlu disusun suatu system perwakilan dalam setiap pengambilan keputusan.

Dasar pemikiran tentang musyawarah inilah yang menjadi dasar demokrasi di Indonesia. Dalam kesempatan selalu muncul keinginan untuk mengadakan rapat untuk memecahkan berbagai permasalahan, untuk itu diperlukan parlemen yang dapat menjadi satu-satunya perwakilan yang dapat menyalurkan berbagai aspirasi dari masyarakat, oleh karenanya diperlukan parlemen yang kuat dan lembaga yang memperkuat control sebagai pengawasan dari rakyat yang berisi dua tujuan yaitu sebagai badan tetap yang menjadi kekuasaan tertinggi bagi pergerakan rakyat Indonesia dan sabagai rapat besar yang melibatkan seluruh rakyat, partai, dan organisasi rakyat.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Muhammad Yamin, *Konstitusi Indonesia dalam Gelombang Demokrasi*, ( Medan : Islamiah, 1950), Hlm.43

Persatuan antar parlemen dan kongres rakyat ini akan mampu mewujudkan persatuan Indonesia yang kuat, seperti yang diutarakan Muhammad Yamin berikut ini ; Usaha rakyat barulah besar dan luhur kalau diukur pikiran yang besar dan luhur, sedangkan pikiran dan cita-cita umum itu tentulah mengikat segala usaha organisasi partai, perkumpulan orang. Inilah persatuan yang bukan membungkam rakyat menjadi tidak berdaya.

Dari dasar-dasar yang disampaikan oleh Muhammad Yamin jauh sebelum BPUPKI dibentuk nyatalah bahwa Yamin sebenarnya telah memikirkan suatu lembaga perwakilan yang kuat, yang dapat mewadahi aspirasi pergerakan rakyat. Dalam kenyataannya Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut UUD 1945 terdiri dari para anggota DPR dan wakil-wakil daerah dan kelompok sosial yang ditetapkan Undang-undang. Penyebutan ini berturut-turut ini memberikan kesan bahwa parlemen akan menjadi perwakilan kelompok-kelompok politik. Pikiran tersebut tidak diungkapkan oleh undang-undang, hanya dikatakan bahwa susunan parlemen akan diatur dengan Undang-undang.

Muhammad Yamin menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak menuntut adanya sebuah undang-undang pemilihan, sehingga parlemen dapat juga disusun dengan jalan, pengangkatan dan penunjukkan atau cara lain. Ungkapan ini disampaikan karena pada waktu itu Yamin ingin memperkuat posisi Soekarno, dimana pada waktu pemerintah menginginkan kembali ke UUD 1945 setelah dewan konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya membuat UUD dengan baik, dan



pemerintah telah mengangkat dewan konstituante melalui pengangkatan.<sup>70</sup> Pada waktu dewan konstituante Indonesia bersidang, Muhammad Yamin menyampaikan pesannya bahwa kembali ke UUD 1945 tidak hanya sekedar mengatasi beberapa kesukaran dewan tetapi merupakan gerakan yang prinsip karena telah di dukung oleh partai politik, golongan fungsional, masyarakat luas.

Kembali ke UUD 1945 adalah memberi dasar hidup dan hendak menyelamatkan tugas luhur bangsa yaitu membentuk negara dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila diatas jalan perjuangan dan pembangunan semesta dengan mengobarkan semangat nasionalisme. Dasar kelima yang diajukan Yamin adalah kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial, sehubungan dengan itu Indonesia merdeka supaya dipikirkan pula tentang pembagian penduduk dengan segala akibatnya yang tertuju pada perekonomian sehingga dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat ada empat hal yang berhubungan langsung dengan keinginan rakyat Indonesia, anara lain daerah negara.

Pembentukan negara Indonesia harus meliputi daerah negara yang sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia, mengenai daerah Indonesia ini yang wilayah tanah airnya di berkahi menjadi tumpah darah Indonesia yang batas dan luasnya meliputi tumpah darah yang meliputi semenanjung Melayu dan pulau Weh di puncak utara Sumatera sampai di kaki gunung Kinibalu dan pulau Palma disebelah utara

---

<sup>70</sup> Muhammad Yamin, *Pembukaan Undang-undang Dasar 1945*, (Jakarta: Prapanca, 1960), Hlm.111.

Sulawesi meliputi delapan daerah (Sumatera, Jawa, Borneo, Malaya, Celebes, Sunda kecil, Maluku, dan Papua) dengan segala pulau di sekelilingnya.

Mengenai wilayah ini Muhammad Yamin memajukan tuntutan atas kemerdekaan Indonesia dalam batas-batas tanah tumpah darah Indonesia dikatakan wilayah kediaman rumpun bangsa Indonesia, meliputi bekas jajahan Hindia Belanda. Dalam masalah wilayah Indonesia ini, ide-ide Muhammad Yamin menjadi panutan bagi Soekarno dalam menentukan batas wilayah Indonesia terlihat dalam pemungutan anggota BPUPKI untuk menentukan wilayah Indonesia yang menyangkut tiga kemungkinan yaitu 1. Hindia Belanda dulu, 2. Hindia Belanda dahulu, Malaya, Kalimantan Utara, Papua dan Timor (Portugis) dan 3. Hindia Belanda ditambah Malaya dan dikurangi Papua, hasil akhirnya dari 66 suara adalah 19 menyetujui alternatif 1, 39 orang menyetujui alternatif 2, 6 suara menuju alternatif 3, 1 suara blanko dan 1 menyimpang.<sup>71</sup>

Hal lain yang diperhatikan adalah penduduk dan putera negara, dan selanjutnya yang ketiga adalah bentuk negara Indonesia, untuk mencapai Indonesia makmur maka bentuk pemerintahannya adalah Republik, sedangkan bentuk monarki tidak akan memberikan jaminan akan menghasilkan negara yang kuat. Untuk berkuasa sebagai kepala negara, sehingga cita-cita untuk mewujudkan kemakmuran yang abadi sulit untuk diwujudkan.

Keunggulan bentuk negara Republik ini Yamin mengatakan sebagai berikut :  
“tetapi dengan langsung ataupun tidak langsung terbayanglah dalam cita-cita

---

<sup>71</sup> Ibid, Hlm. 115

kemerdekaan itu suatu negara Indonesia yang didalamnya akan ada pembagian kekuasaan rakyat seluruhnya dan pembagian kekuasaan rakyat itu sebagai cita-cita pergerakan kemerdekaan, tidak lain dan tidak bukan terbayang dalam suatu republik 40 tahun pergerakan kemerdekaan Indonesia mendekatkan kita kepada cita-cita suatu negara merdeka.

. Untuk mendukung adanya negara Republik Indonesia tersebut maka Yamin menyarankan agar dibentuk negara kesatuan. Mengenai keunggulan negara kesatuan ini Yamin berpendapat sebagai berikut : Banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain daripada negara kesatuan yang tidak perlu saya uraikan panjang lebar melainkan saya nyatakan saja syarat-syarat yang ada dalam dada Indonesia menurut pandangan dan keyakinan saja, maka pergerakan memberi bahan untuk membentuk suatu negara unitarisme, karena unitarisme hanyalah dapat diwujudkan dengan negara kesatuan. Dalam negara kesatuan itu sepenuhnya kita jalankan unitarisme dan melanjutkan penyerangan kepada federalisme. Paham geopolitik memberi nyata untuk mengadakan negara kesatuan.<sup>72</sup>

Kelebihan negara kesatuan adalah sebagai berikut: jadi dengan segala kesederhanaan saya berkeyakinan bahwa konstituante republik Indonesia hanya dapat disusun kalau didasarkan atas negara kesatuan, dengan mewujudkan segala syarat-syarat untuk mementingkan daerah, pembagian kekuasaan di pusat antara badan-badan pusat sendiri dan pembagian kekuasaan rakyat antara badan pusat dan badan daerah, haruslah diatur dengan keadilan dan kebijaksanaan, sehingga dapat daerah-

---

<sup>72</sup> Ibid, 37

daerah mementingkan keadaan daerah istimewa. Dalam unitarisme membuang federalisme dan menjalankan otonomi daerah, karena kepentingan daerah maka pembagian kekuasaan dijalankan secara adil menurut keharusan administrasi.

Pemikiran tentang negara kesatuan rupanya menjadi pemikiran utama Yamin dalam usaha membangun Indonesia. Pada akhirnya setelah mengadakan rapat, panitia perancang UUD berhasil merumuskan konsep UUD yang terdiri dari 15 bab, 42 pasal termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Konsep dasar ini pada akhirnya dibahas lagi pada rapat besar 14 Juli 1945, dalam rapat besar tersebut yang berbicara antara lain Radjiman, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Yamin, Surjo, Agus Salim, Wiranatakusuma dan abikusno. Pada rapat 15 juli 1945 tentang kementerian negara Yamin berpendapat bahwa segala menteri dan kementerian bersama-sama dengan pemerintah pusat hendaklah harus bertanggung jawab kepada dewan perwakilan kementerian.

Hal ini ditolak oleh Soepomo yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ada sistem yang dianut bukan semanya sendiri. Pendapat Yamin tentang kementerian tersebut memang tidak mempunyai aturan yang jelas. Dalam menanggapi rancangan UUD dari panitia perancang termasuk aturan kemerdekaan warga negara. artinya bahwa aturan kemerdekaan warga negara dimasukan ke dalam Undang-undang secara jelas.

Usulan Muhammad Yamin akhirnya ditarik kembali dan pemikiran ini merupakan sikap warga negar Indonesia yang lebih mementingkan perlindungan, pemikiran ini merupakan sikap sebagai humanisme. Uraian dan usulan Yamin yang

selanjutnya adalah tentang pembagian kekuasaan berdasarkan kekuasaan pemerintahan.<sup>73</sup> Dalam proses perdebatan di dalam sidang BPUPKI ada dua aliran ideologi yang menjadi perdebatan keras yaitu ideologi kebangsaan dan ideologi Islam. Ideologi kebangsaan tampak di dalam pandangan-pandangan yang mempertahankan persatuan, kebangsaan, kekeluargaan, kerakyatan, dan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pendapat yang menghendaki masuknya hak-hak dasar di dalam Undang-undang dasar, adanya pertanggungjawaban menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ideologi kebangsaan ini, menghendaki adanya pemisahan antara urusan agama dan urusan kenegaraan. Hal ini antara lain disampaikan oleh Soepomo, Hatta, Soekarno, Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh lainnya. Muhammadiyah hatta menyampaikan bahwa dalam negara persatuan Indonesia urusan agama harus dipisahkan dari urusan negara, sedangkan aliran ideologi Islam tampak dari pendapat-pendapat yang menghendaki bahwa agama Islam menjadi dasar negara, negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. bahwa agama presiden harus Islam dan bahwa agama resmi negara adalah agama Islam.

Perbedaan pendapat antara golongan kebangsaan dan Islam ini masih terus berlanjut, dan dalam pengambilan keputusan akhirnya ditempuh suatu jalan kompromi. Misalmya tentang presiden yang harus agama Islam, dicapai kompromi bahwa calon presiden adalah orang Indonesia asli.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Ibid, Hlm.74

<sup>74</sup> Ibid, Hlm. 90

Sebagai anggota perancang Undang-Undang Dasar yang masuk dalam bidang keuangan, Yamin memberikan beberapa pemikirannya dalam bidang perekonomian dan keuangan. Dalam bidang perekonomian ini pemikiran dapat digolongkan dalam beberapa pemikiran, pertama tentang pembagian urusan ekonomi untuk mencapai hubungan yang harmonis antara tentara jepang dan pemerintahan kebangsaanIndonesia diperlukan batas-batas usaha kedua belah pihak sehingga tidak terjadi benturan kepentingan. Pemikiran kedua adalah memperbesar produksi dalam segala lapangan yang akibatnya dapat memperbaiki penghidupan, dan juga menambah pendapatan negara. dan yang ketiga menyarankan adanya bank sirkulasi yang diberi nama bank Indonesia.

Meskipun Muhammad Yamin tidak masuk dalam panitia perancang UUD, namun sangat aktif dalam setiap pembahasan hal ini dapat dilihat dari jumlah pembicaraan yang disampaikan dalam sidang. Selama sidang telah banyak menyampaikan pendapatnya sebanyak 30 kali, dan jika digolongkan antara lain tentang dasar negara, wilayah Indonesia setelah merdeka, pernyataan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-undang, perlindungan warga negara, batas wilayah negara, lembaga tinggi negara dan pembelaan negara.

Dalam perdebatan yang intensif diantara para anggota BPUPKI maka Undang-Undang Dasar dapat terbentuk mengenai lancarnya proses pembuatan UUD ini, menurut Muhammad Yamin karena ada tiga suasana pada waktu itu yaitu suasana nasional yang sudah ada perpaduan sinthesa daripada aliran pikiran terhadap tercapainya kemerdekaan yang kalimat pertama dalam pembukaan konstitusi telah

dinyatakan menjadi hak segala bangsa, suasana kedua yaitu sekutu melawan Jepang, ketiga suasana hukum internasional pada saat itu telah muncul berbagai perkembangan baru dalam hukum internasional. Hal ini yang ikut mendorong cepat terselesaikannya Undang-undang Dasar.

Pemikiran Muhammad Yamin dalam rangka penyusunan dasar negara dan Undang-Undang dasar negara sangat besar peranannya, meskipun bukan satu-satunya namun banyak masukan dari Muhammad Yamin yang diutarakan pada sidang-sidang tersebut meskipun tidak seluruhnya diterima, misalnya tentang batas territorial yang mendapat dukungan kuat dari anggota BPUPKI dan telah digunakan untuk mewujudkan pan Indonesia. Dalam rangka pembubaran uni Indonesia-Belanda yang disusun sejak 27 Desember 1949, maka pada tanggal 28 Juni sampai dengan 10 Agustus 1954 telah dilangsungkan konferensi tingkat menteri di Den Haag antara delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Sunario dengan anggota Muhammad Yamin, Iskaq Tjokrohadisurdjo, Soepomo, Suanto Tirtoprodjo. Hilmy, Anak Agung Gede Agung, Sugiarto, Zairin Zain Khow Bianti, Hermen, Soerdarsono dan delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Luns telah disepakati pembubaran uni Indonesia Belanda.<sup>75</sup>

Adapun penyebab dibubarkan uni Indonesia Belanda adalah bahwa persahabatan untuk mewujudkan kerjasama, ternyata pihak Belanda tidaklah siap untuk memecahkan masalah Irian Barat. Selain itu kedudukan ratu Juliana sebagai kepala Uni Indonesia Belanda adalah mengurangi kedaulatan Indonesia. Setelah

---

<sup>75</sup> Ibid, Hlm. 101

pembubaran uni ini, maka dapat dilaksanakan tujuan diplomatik untuk memperbaiki hubungan politik, ekonomi, dan moneter antara Indonesia dengan Belanda menjadi hubungan biasa, seperti hubungan Indonesia dengan negara asing lainnya.<sup>76</sup>

Dalam rangka penyusunan lambang negara sebagai manifestasi pelaksanaan terhadap UUD 1945 maka dibentuklah sebuah panitia lencana negara. Sebagai tindak lanjutnya maka dibuatlah sayembara pembuatan gambar lambang negara. Yamin mengajukan konsep gambar untuk mengisi ruangan yang ada didalam perisai burung garuda dan juga mengajukan konsep gambar secara utuh. Namun dari sayembara tersebut maka usulan Sultan hamid II yang diterima. Muhammad Yamin dengan segala kekurangannya dan kelebihanannya ternyata dapat dikatakan sebagai *the founding father* yang hebat, yang telah memikirkan persatuan Indonesia dan meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi Indonesia setelah merdeka, baik dalam wilayah maupun sistem pemerintahan. Selain itu Yamin merupakan tokoh yang selalu terlihat dalam penyusunan karya monumental pemersatu bangsa.

Demokrasi terpimpin telah menempatkan posisi Soekarno dalam kancah politik di Indonesia semakin kuat. Lawan-lawan politik dari PSI dan Masyumi telah berhasil dibungkam, namun perdebatan mengenai bentuk konstitusi yang akan menunjang demokrasi terpimpin tidak kunjung selesai. Hal ini tentu saja sangat mengganggu usaha Soekarno untuk menjalankan demokrasi terpimpin secara efektif, untuk itu sesuai dengan hasil rapat kabinet ditekankan perlunya agar kembali ke UUD

---

<sup>76</sup> Mr. Muhammad Yamin, *Pembentukan dan pembubaran uni* , (Jakarta : Bulan Bintang, 1959) Hlm.24



1945, sebagai langkah awal gerakan kembali ke UUD 1945 maka dibuatlah undang-undang kepartaian.

Muhammad Yamin sebagai pendukung utama dalam pemerintahan Soekarno, terkait kedudukannya sebagai anggota dewan nasional memberikan solusi terhadap kemelut rapat di dewan konstituante dengan menyampaikan pendapat bahwa satu-satunya jalan untuk menjamin ketentraman negara maka hukum Republik Indonesia secara prinsipil kembali ke UUD 1945. Periodisasi Pembentukan UUD Negara Republik Indonesia, Bahasan dibawah ini mengulas tentang perkembangan pembentukan Undang-Undang Dasar dari awal hingga empat tahun setelah negara dibawah Undang-Undang Dasar negara RI yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 tidak ada ketentuan pasal menghendaki atau memerintahkan dibentuknya undang-undang tentang membentuk, mengundang, dan mulai berlakunya Undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan pemerintah.<sup>77</sup>

Berdasarkan risalah sidang keempat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 telah disepakati bahwa komite nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat. Komite nasional dibentuk diseluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta yang pelantikannya dilakukan pada tanggal 29 Agustus 1945. Pancasila yang merupakan pedoman tingkah laku sehari-hari secara gradual terkandung dalam norma-norma fundamental yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang

---

<sup>77</sup> Ibid, Hlm.33

terlukiskan dalam perjuangan atas pergerakan bangsa Indonesia dahulu, kini, dan yang akan datang. Dari sinilah kemudian dapat ditemui cita-cita bernegara bangsa Indonesia atau bisa juga disebut pandangan bernegara bangsa Indonesia.<sup>78</sup>

Pandangan hidup bangsa dapat dinamakan dengan ideologi dan prinsip dasar bangsa Indonesia dalam menentukan hidup dan kehidupan serta mau dibawa kemana negara Republik Indonesia. Dengan Pancasila, semuanya dapat terarah dengan baik sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Pancasila sebagai ruh bagi setiap aktivitas dalam sendi-sendi kehidupan bangsa tanpa ditiupkan ruh, maka segala perbuatan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam pandangan hidup ini terkandung konsep dasar mengenai kehidupan dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.

Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang telah yakin kebenarannya dan kesediaan untuk mewujudkan di dalam tatanan tindakan, sikap, perilaku hidup, dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai kristalisasi tersebut terdapat didalam Pancasila di sila pertama ketuhanan yang maha Esa dan merupakan nilai inti dan nilai sumber, masing-masing saling menjiwai dan meliputi dan memberikan landasan dalam menentukan tekad pada bangsa untuk mewujudkannya. Ulasan komprehensif tentang proses harmonisasi Pancasila dan Islam dalam tatanan politik Indonesia menjelaskan tentang Pancasila: Antara Negara Sekuler dan Negara Islam.

---

<sup>78</sup> Ibid, Hlm.91

Pancasila diterima sebagai ideologi negara melalui tiga tahap perdebatan ideologis dari para pengusungnya masing-masing dengan kelompok Ideologi Islam. Tahap pertama, perdebatan sebelum kemerdekaan. Tahap kedua, perdebatan dalam pembahasan konstituante. Tahap ketiga, perdebatan di Dewan Konstituante. Proses perdebatan ideologis tersebut tidak hanya melahirkan kompromi politik akan tetapi telah menempatkan Pancasila pada posisi yang dilematis antara Negara dan Agama.<sup>79</sup>

Harmonisasi antara Pancasila dan Islam dalam akan terjadi jika menempatkan posisi Ideologi Pancasila dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Indonesia bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama saja. Di sisi lain juga bukan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak terlibat dalam urusan agama. Negara Pancasila adalah *religions nation state*, yakni negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi perkembangan semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa pembedaan besarnya dan jumlah pemeluknya.

Agama menjadi sumber pandangan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga juga menjadi sumber bagi Pancasila. Hal tersebut menjadi inti dari hubungan Islam dan Pancasila, walaupun kadang muncul pertanyaan agama yang mana dan bagaimana jika terjadi pertentangan. Agama menjadi motivasi individu dengan cara dituangkan dalam Pancasila sebagai pandangan bangsa dan negara Indonesia.

---

<sup>79</sup> Muhamad Ali Sifaat, *Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia* ( Jakarta; Elex Media, 2018), Hlm 103

Indonesia sebagai negara yang bersifat pluralisme, Oleh karena itu Pancasila dan Islam memiliki pola hubungan yang dialogis , berjalan terus-menerus secara dinamis dan seimbang, serta saling melengkapi. Selanjutnya, dijelaskan juga menurutnya secara ideal, hubungan negara dan agama di Indonesia tidak ditempatkan dalam konteks dikotomi, melainkan ditempatkan pada posisi yang harmonis dalam bingkai nilai- nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Bangsa Indonesia tidak menolak modernisasi sejauh tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Hal ini menjadi wahana bagi kelompok muslim terdidik untuk berperan signifikan terhadap pertumbuhan gerakan demokrasi.

Untuk mewujudkan harmonisasi Pancasila dan Islam dalam tatanan politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari diskursus berkepanjangan tentang penerapan proses sekularisasi politik. Perwujudan negara Pancasila merupakan hasil kompromi politik yang dapat mengakhiri (sementara) diskusi hubungan negara dan agama. Hampir sama dengan para ahli lainnya, dalam menjelaskan konsepsi dan gagasan tentang harmonisasi Pancasila dan Islam dengan mengajukan pemikiran tokoh penting yang telah mempengaruhi diskursus tentang sekularisasi dalam tatanan politik Indonesia.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Ibid, Hlm.104

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka kesimpulan dalam penulisan tesis yang berjudul Pemikiran Muhammad Yamin dalam perumusan dasar negara ini adalah adanya pembentukan pemikiran Yamin mengenai dasar-dasar negara Indonesia berlangsung dalam rentang yang panjang, sejak keterlibatannya sebagai pemuda aktivis pergerakan hingga peranannya sebagai pejabat publik dalam era Indonesia merdeka serta dasar ketuhanan dan humanisme menjadi point pemikiran dalam perumusan dasar negara.

#### **B. Saran-saran**

Kajian mengenai sejarah tokoh atau studi tentang riwayat hidup seorang tokoh secara mendalam mengetahui pemikirannya dan penyusunannya secara sistematis telah banyak, akan tetapi didalam perkembangannya hanya sedikit yang membahas tentang tokoh yang pemikirannya mengenai perumusan dasar negara sebagai bagian dari dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hasil karya tulis tentu memiliki referensi dan dasar-dasar yang kuat untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terlepas dari hal itu, hasil karya tulis adalah buah tangan dari manusia yang sedikit banyaknya mengandung unsur kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak. Tentunya tidak sempurna tanpa kritik dan

saran serta masukan yang bersifat positif dan membangun. Maka dalam hal ini penulis memberikan peluang kepada siapa saja yang ingin mengkritisi dan menindaklanjuti penelitian ini, agar diterima menjadi karya yang diakui secara akademik. Semoga tesis ini dapat dikembangkan dalam tulisan-tulisan sejarah dimasa yang akan datang serta mampu membuka cakrawala pemikiran dan wawasan keilmuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, (2018) *Islam Berdialog dengan Zaman*, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann.. (1990), *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES
- Darji Darmodiharjo (1991) *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional
- Djunaedi, (2016). *Muhammad Yamin “Penggagas Indonesia yang dihujat dan dipuji”*, Jakarta : KPG
- Dwi Purwoko, (2001), *Nasionalis Islam*. Jakarta : Kreasi,
- Endang Syaifuddin Anshari.(1981). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Islami dan Nasionalis Sekuler tentang dasar Negara RI*. Bandung: Pustaka Salman.
- Foucault. (2019). *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta:BasaBasi
- Gunawan Muhammad, (2014) *Mr. Muhammad Yamin*, Jakarta: Majalah Tempo
- Helius Sjamsuddin, (2012). *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak
- Hugiono dan P.K. Poerwantana, (1992) *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Reinika Cipta
- Kuntowijoyo, (2003). *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wicana
- M.Burhan Bungin, (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- M.Dien Madjid dan Johan Wahyudi, (2014). *Ilmu Sejarah: sebuah Pengantar*, Jakarta : Kencana

- Muhammad Hatta, (1969) *Sekitar Proklamasi*, Djakarta : Tintamas
- Muhammad Yamin, (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Yayasan Prapanca
- Muhammad Yamin, (1959). *Tinjauan Pantjasila Terhadap Revolusi Nasional*, Jakarta : ANRI
- Muhammad Yamin, (1960 ) *Pembukaan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta : Prapanca,
- Muhammad Yamin, (1952). *Sistem Falsafah Pancasila*, Jakarta : Djambatan
- Muhammad Yamin, (1950) *Konstitusi Indonesia dalam Gelombang Demokrasi*, Medan : Islamiah
- Muhammad Yamin, 1959) *Pembentukan dan Pembubaran Uni* , Jakarta : Bulan Bintang
- Noeng Muhajir, (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nugroho Notosusanto, (1981) *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*, Jakarta : Balai Pustaka
- Prawoto Mangkusasmito, (1977). *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*, Jakarta : Bulan Bintang,
- Robani La ode dkk, ( 2010), *Sejarah Pemikiran Indonesia Modern*, Jakarta : Dirjen kemendikbud
- Rima Kainama, (2013), *Keaneka-an dalam Simpul Persatuan*, Jakarta : Etika Sosial
- Rocky Gerung, 2018). *Membongkar dan Merangkai Pancasila*, Jakarta : Prisma
- Saefur Rochmat, (2009). *Ilmu Sejarah dalam Persepektif Ilmu Sosial* . Yogyakarta: Graha Ilmu



Safroedin Bahar, (1995). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Negeri RI

Sartono Kartodirdjo, (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia

Sutrisno Kutoyo, (2004). *Prof. H. Muhammad Yamin*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya

Suyitno, (2001) *Konsep Negara*, Jakarta, : Bumi Aksara

Syahrin Harahap, (2014) *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan biografi*, Jakarta : Preneda

Welmar, (1997) . *Mengenang Maha putra Prof Mr. Muhammad Yamin Pahlawan nasional RI*, Bukit Tinggi : CV.Kristal Multimedia

Yudi Latif, (2011) *Negara Paripurna: Historisitas Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta : GPU